

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO *n*ext

Edisi 10  
Oktober 2019



## ***DARI CHIEF RA KE BANG JOHNNY***

**SERAH TERIMA JABATAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**

**Pengarah**  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika RI

**Pembina**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian  
Komunikasi dan  
Informatika RI

**Penanggung Jawab &  
Pemimpin Redaksi**  
Ferdinandus Setu

**Redaktur  
Pelaksana**  
M. Taufiq Hidayat

**Redaktur**  
Frans Bambang Irawan,  
Daoni Diani Hutabarat,  
Verawati, Helmi Fajar  
Andrianto, Viskayanesya

**Reporter**  
Patricia Samantha  
Silalahi, Annisa  
Bonita P., Yusuf,  
Tommy Tirtawiguna

**Fotografer**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumule,  
Sri Indrati Novinarsari

**Desain & Layout**  
Adista Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rahmattunnisa

**Produksi & Sirkulasi**  
Fahmie Trihatin Januarsyah

# TUGAS LUHUR KOMINFO

## UNTUK MEMBANGUN NARASI

Ketika ada kontroversi penayangan iklan Kominfo di bioskop tentang keberhasilan program-program pemerintah beberapa waktu lalu, saya adalah salah satu orang yang berada di garis terdepan untuk membela Kominfo. Saat itu saya masih berada di legislatif.

Saya katakan bahwa penayangan iklan tentang capaian pemerintah di layar bioskop tersebut bukan bentuk kampanye. Iklan yang ditayangkan tentang pembangunan bendungan itu hanya menyampaikan kemajuan proyek yang tengah dikerjakan.

Publik perlu diberi informasi faktual informasi terkait proyek-proyek yang tengah dikerjakan menggunakan kas negara. Itu merupakan bagian dari capaian nasional pemerintah yang harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan karena yang digunakan adalah uang rakyat.

Justru jika Kominfo tidak melakukan hal tersebut, Kominfo pantas dipersalahkan karena tidak menginformasikan pertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan hal senada. Presiden menjelaskan bahwa iklan bendungan yang menjadi polemik yang dikeluarkan oleh Kominfo, sudah sesuai amanat Undang-Undang. Kominfo, sesuai regulasi, ditugaskan untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan, baik yang sudah selesai, masih dalam proses, atau belum selesai.

### Amanat Regulasi

Apa saja regulasi yang mengamanatkan hal itu? Setidaknya ada tiga, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika ditugaskan oleh Presiden untuk:

1. Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Jadi dalam perspektif amanat regulasi dan tugas luhur-struktural Komunikasi Publik Pemerintah (Government Public Relations), iklan seperti iklan bendungan itu adalah kewajiban-kewajiban mendasar yang harus terus kita lakukan dalam level kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi lagi.

Komunikasi kebijakan merupakan salah satu fungsi utama dari Kominfo yang harus berjalan seimbang. Jika rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, mereka akan bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul.

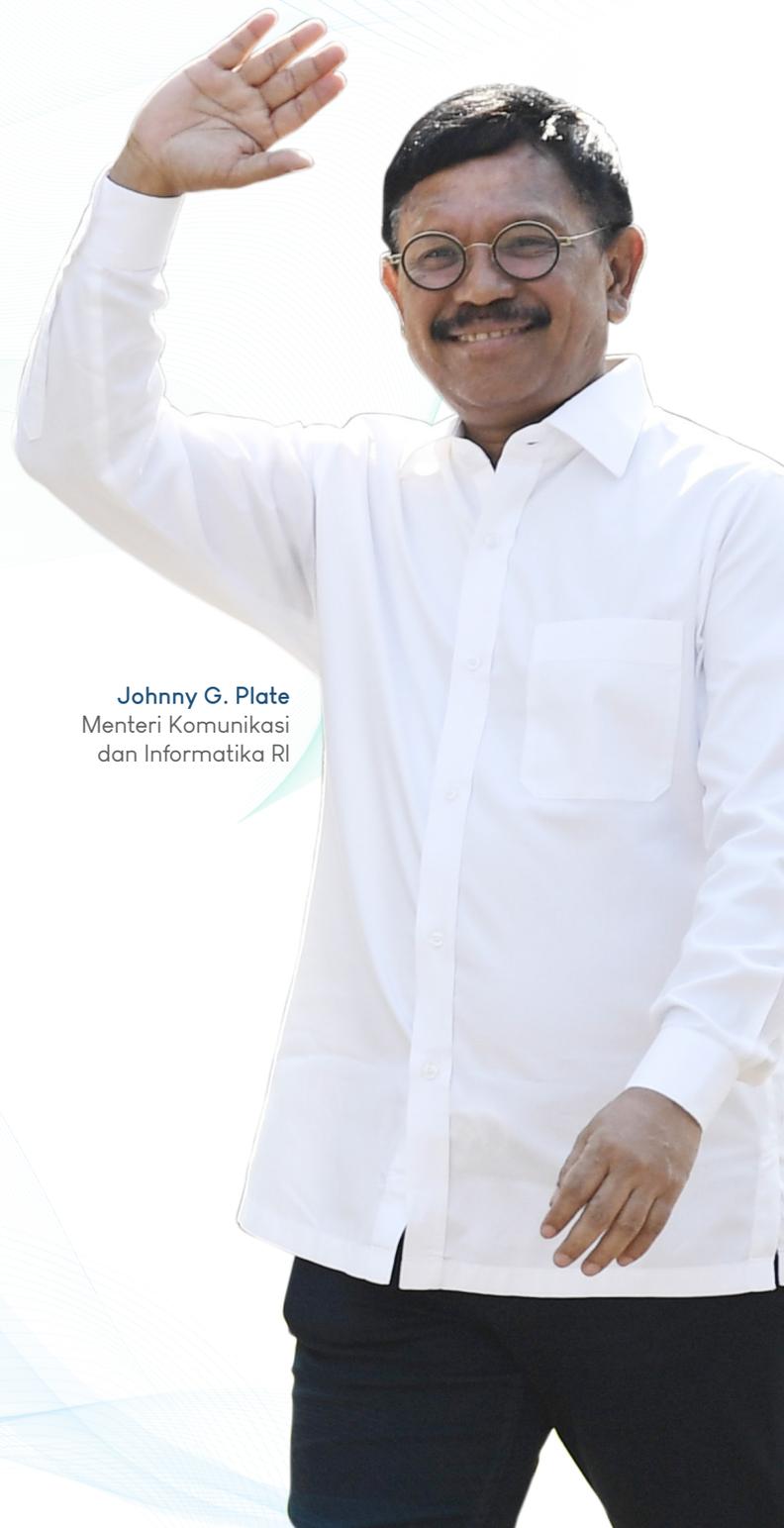
## Prioritas GPR

Dalam lima tahun ke depan itulah yang akan kita lakukan. GPR akan menjadi satu dari dua garis besar program prioritas Kominfo, bersama dengan pembangunan infrastruktur digital.

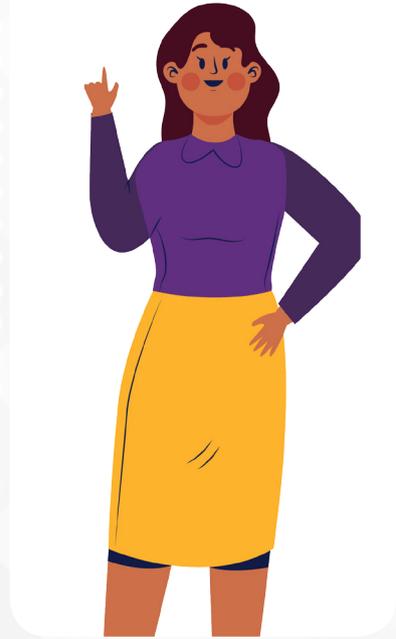
Kedua garis besar program prioritas ini --GPR dan infrastruktur digital-- juga harus mampu saling dukung satu sama lain. Infrastruktur digital yang dibangun harus juga di-GPR-kan sebagai contoh keberhasilan program pemerintah. Sebaliknya, GPR harus juga dapat ditingkatkan intensitasnya dengan memanfaatkan sebesar mungkin saluran-saluran komunikasi dan informasi, termasuk juga infrastruktur digital yang kita bangun untuk rakyat, dan juga untuk pemerintah.

Kita sendiri di Kominfo pasti meyakini bahwa apa yang kita layani untuk rakyat didasarkan atas kehendak baik. Kita sebagai bagian dari pemerintah sekaligus pelayan rakyat disumpah untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat.

Namun dalam era *post-truth* seperti sekarang ini, sekadar kehendak baik saja praktis tidak mencukupi lagi. Kita harus kuat-kuatan membangun narasi tentang kemaslahatan program-program yang sudah dilakukan pemerintah. Namun kita juga harus siap mengembangkan kontra-narasi manakala ada yang mencekokkan opini yang tidak benar kepada masyarakat atas program-program tersebut.\*\*\*



**Johnny G. Plate**  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika RI



01 .....  
PERSPEKTIF MENTERI

04 .....  
SURAT DARI MMB 9

06 .....  
BERITA TEKNOLOGI

09 .....  
RAK BUKU

10 .....  
RESENSI BUKU

20 .....  
LIPUTAN UTAMA

20 .....  
DAMO,  
SEMANGAT AKSELERASI  
EKOSISTEM DIGITAL  
INDONESIA

24 .....  
ESTAFET BANGUN  
SEKTOR KOMINFO

30 .....  
KABINET INDONESIA  
MAJU JAMIN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT  
DI DUNIA MAYA



32 .....

TOKOH KOMINFO

40 .....

SOROTAN MEDIA

44 .....

PORTAL KOMINFO

50 .....

TOK - TOK KOMINFO



53

MISS LAMBE HOAKS

58 .....

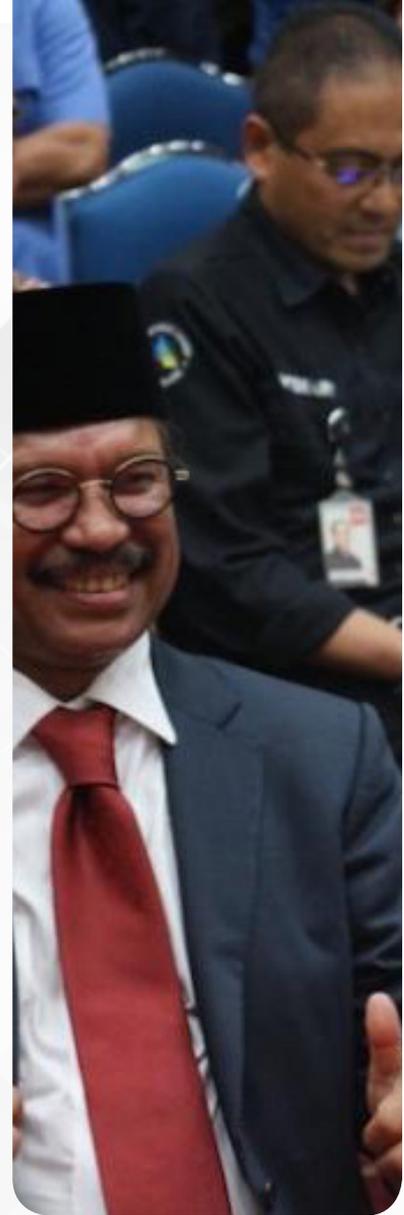
JURNAL FOTO

70 .....

SISTERNET

72 .....

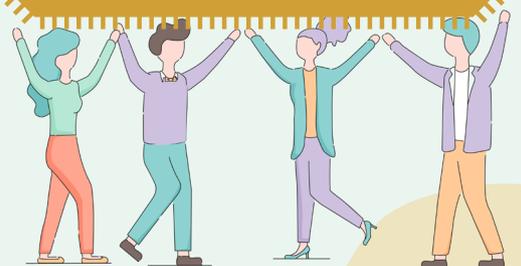
LINTAS KOMINFO



Redaksi KominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikasi dalam KominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 dikirimkan melalui

[majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id](mailto:majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id)

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan.



# SALUS POPULI SUPREMA LEX

Terpilihnya Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Memkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju melahirkan rasa bangga bagi almamaternya, Seminari Pius XII Kisol, sekolah yang berada di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lewat sebuah video yang beredar luas di media sosial baru-baru ini, pimpinan, guru dan siswa sekolah itu menyatakan rasa bangga pada Menteri Johnny.

Romo Dyonisius Osharjo, praeses atau pimpinan umum di sekolah yang biasa disebut Sanpio itu menyatakan rasa syukur atas tugas baru yang diemban Johnny. "Kiranya kuasa Tuhan menyertai seluruh rencana dan kegiatan kementerian selama lima tahun ke depan," kata Romo Dyonisius melalui video tersebut. "Sanpio sangat bangga atas peristiwa ini. Tuhan memberkati," katanya.

Johnny G Plate yang dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 23 Oktober menempuh pendidikan SMP di Sanpio Kisol pada tahun 1970–1972. Sekolah itu sudah memiliki lebih dari lima ribu alumni terdiri jenjang SMP dan SMA. Tercatat sebagai salah satu sekolah favorit di NTT, alumninya telah banyak berkiprah di berbagai bidang, termasuk di level nasional.

Sebagai alumni Seminari Sanpio Kisol yang terbiasa dengan Bahasa Latin, Menteri Johnny memiliki moto hidup dalam Bahasa Latin. *Salus Populi Suprema Lex*. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tentu moto ini bukan rangkaian kata buatan Menteri Johnny sendiri. Adagium tersebut pertama kali dilontarkan oleh Cicero.

Marcus Tullius Cicero (106 SM–43 SM) dikenal sebagai seorang politikus yang berusaha menegakkan demokrasi secara murni. Saat Romawi dikuasai oleh para oligark, penganut ajaran epikureanisme ini lantang menentang

penguasa melalui orasi-orasinya yang penuh dengan retorika.

Dalam salah satu bukunya *de Re Publica*, Cicero pernah meramalkan, bahwa suatu negara akan mengalami kemunduran, saat pemimpinnya korup, dan mementingkan diri-sendiri dengan mengabaikan hak-hak masyarakatnya. Hal ini dipahami, setelah mempelajari ide Republik karya Plato, bahwa konstitusi politik dalam sebuah negara pada dasarnya memang tidak akan bertahan selamanya.

Belajar dari musnahnya Republik Romawi, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik secara masif, menjadi kemunduran negara tersebut. Para penguasa ini, tulis Cicero, tidak lagi memperhatikan elemen nilai kode etik pada tugasnya masing-masing. Mereka cenderung melakukan konspirasi atau arogansi dalam mengambil kebijakan publik.

Secara spesifik Cicero menegaskan, saat Parlemen, yang pada hakekatnya adalah perwakilan dari pelayan rakyat. Mereka tidak mampu menahan godaan untuk memperkaya diri-sendiri maupun kelompok, serta tidak mampu satu suara, akibat mengutamakan kepentingan masing-masing. Akibatnya, kemunduran telah terjadi di negara tersebut.

Mengapa? Sebab saat itulah para pemegang kekuasaan telah terbuai dengan segala hak-hak istimewa (*prevelege rights*) yang didapat dari jabatannya. Tanpa disadari, mereka pun tidak malu untuk melacurkan hak-hak tersebut, dengan membuat aturan-aturan yang mampu melanggengkan kekuasaan dan kekayaan bagi diri sendiri maupun kelompoknya.

Itulah sebabnya, tujuan berdirinya negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama bernegara. Untuk menjalankan negara diperlukan hukum dan perundangan. Dan hukum tertinggi menurut Cicero adalah kesejahteraan rakyat.

Setelah dilantik di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2019 pukul 10.00 pagi, Menteri Johnny langsung melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Kominfo RI Periode 2014 sd 2019, Chief Rudiantara. Tongkat estafet kepemimpinan atas Kementerian Kominfo RI beralih dari Chief RA ke Bang Johnny. Beragam prestasi dan capaian yang ditorehkan Chief RA dan jajaran pada lima tahun pertama Pemerintahan Jokowi akan menjadi modal bagi Bang Johnny untuk menata sektor komunikasi dan informatika di lima tahun berikutnya. Selamat bekerja, Bang Johnny.



Ferdinandus Setu  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

IN

# KOMINFO

*we trust*

KUNJUNGI KAMI DI:

 @KEMKOMINFO

 KEMKOMINFO

 @KEMENKOMINFO

 KEMKOMINFO TV

ATAU LANGSUNG  
SCAN QR-NYA



ON GOING:



Lambe Hoaks

2X DALAM  
SEMINGGU  
SENIN & KAMIS

SETIAP AKHIR  
BULAN

KOMINFO **next**



1X DALAM  
SEMINGGU

#KOMINFOPEDIA

2X DALAM SEBULAN

TikTok  
ID : Kemkominfo

SETIAP HARI

COMING SOON:

- KOMINFOHITS!
- VIRAL POSITIF
- KAMERA KOMINFO
- TAMU KOMINFO



# Gadget Bagi Penderita Stroke

Oleh, Akhda Afif Rasyidi  
Pusat Data dan Sarana Informatika

Hi Sobatkom! Setiap tanggal 29 Oktober, diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia yang digagas oleh World Stroke Organization pada tahun 2004.

Berdasarkan data dari Balitbang Kementerian Kesehatan tahun 2013, jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang. Jumlah persebaran penderita tertinggi adalah pada usia 55-64 tahun. Dengan perkembangan teknologi terkini, terdapat beberapa produk yang didesain untuk membantu pemulihan dan pendeteksian penyakit stroke, baik dalam bentuk *prototype* maupun telah dirilis ke pasar sebagaimana berikut ini.

## 1 Sarung tangan rehabilitasi

Produk ini digunakan sebagai produk rehabilitasi tangan dan pergelangan tangan berteknologi tinggi untuk penderita *stroke*, yang mengukur gerakan tangan dengan *accelerometer* dan sensor khusus. Dengan media yang dirancang khusus, penderita *stroke* dapat melatih untuk menggenggam barang yang biasa digunakan sehari-hari, meskipun kondisinya tidak lentur seperti biasanya.

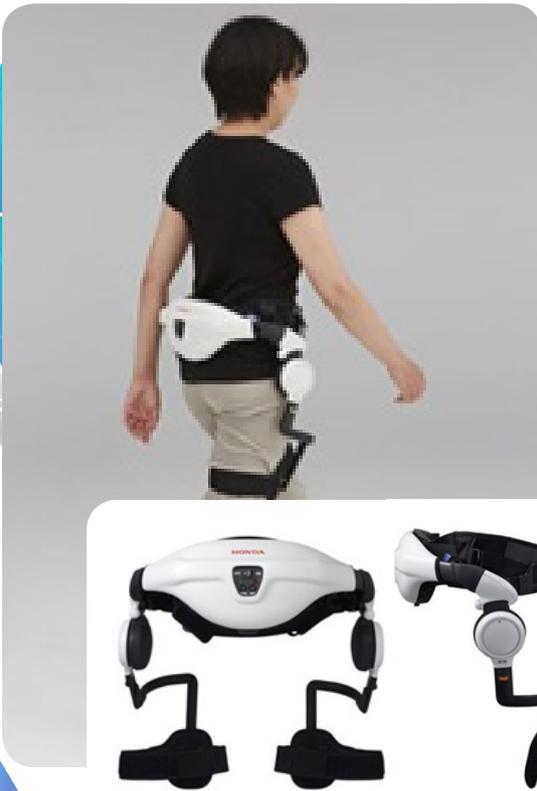
Dari pengakuan salah seorang pengguna, sarung tangan ini sangat membantunya memulihkan *stroke* yang menyerang jari tangannya. Setelah penggunaan alat ini, berangsur jari tangannya tidak kaku lagi.



## 2 Honda Walking Assist Device

Pada tahun 2013, tim riset Honda telah menciptakan *wearable gadget* bagi siapa saja terutama mereka yang terkena penyakit *stroke* ataupun orang yang mengalami masalah dengan organ kakinya untuk mendapatkan mobilitas yang lebih baik.

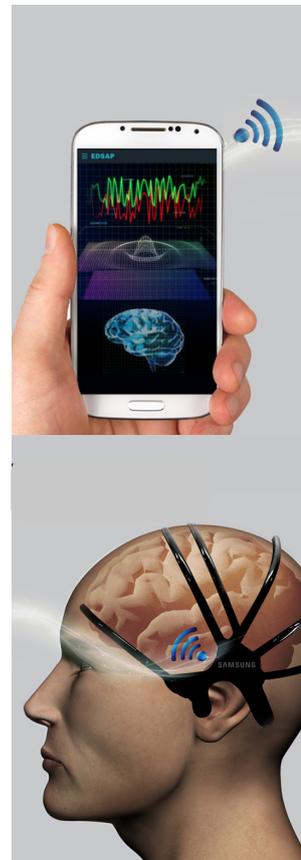
Alat ini berfungsi untuk membuat penggunanya bisa berjalan dengan sempurna dengan mempelajari ritme gerakan pengguna dari sensor yang ditaruh di pinggang dan lutut untuk menemukan ritme gerak yang paling tepat untuk penggunanya.



## 3 Early Detection Sensor & Algorithm Package

Pada tahun 2015, salah satu kelompok riset di Samsung mempublikasikan riset *prototype* yang diberi nama Early Detection Sensor & Algorithm Package (EDSAP), sebuah alat pendeteksi *stroke* dengan menggunakan gelombang otak. Alat ini terdiri dari dua bagian, yakni sebuah headset dan sebuah aplikasi untuk perangkat mobile. Di headset tersebut terdapat sensor yang mendeteksi rekam gelombang otak, yang hasilnya diteruskan ke *mobile apps*. Dalam interval waktu 1 menit, akan ditampilkan hasil analisisnya di *mobile apps* tersebut.

Saat ini alat tersebut masih dalam tahap pengembangan, juga masih memerlukan uji klinis sebelum berada di pasar. Tim tersebut juga sedang memperluas kemungkinan deteksi problem neurologis lainnya, misalnya jantung.



## 4 RAPAEL Smart Board

Ini adalah alat yang dapat diakses oleh pasien *stroke* yang mengalami keterbatasan dengan bahu dan sikunya. Alat ini berupa gabungan antara papan beroda yang divisualisasikan dengan layar. Pengguna dengan panduan instruktur meletakkan tangannya di papan, kemudian menggerakkan sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Aktivitas yang ditampilkan di layar dapat berupa permainan, olahraga, atau aktivitas sederhana.



# Perpustakaan Kominfo



LANTAI 1 GEDUNG B

SENIN S.D JUMAT

08.00 S.D 16.00

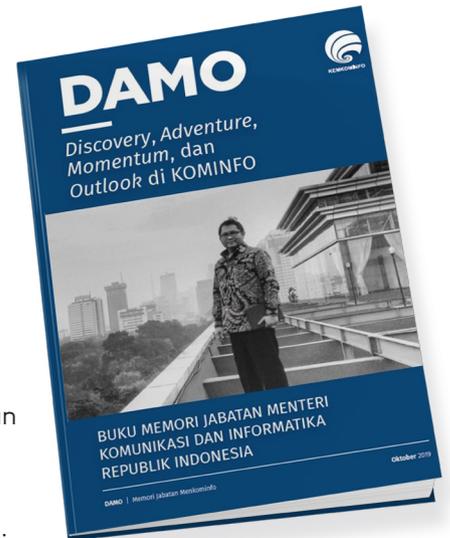
## **DISCOVERY, ADVENTURE, MOMENTUM, DAN OUTLOOK DI KOMINFO**

**Buku Memori Jabatan**

**Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**

Penerbit : Biro Perencanaan Kemkominfo

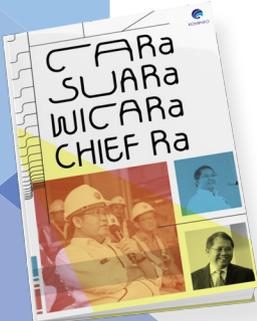
Buku ini berisi perjalanan Chief RA selama menjabat sebagai Menteri Kominfo. Kerangka DAMO lahir dari pemikir dan pelaku bisnis digital Asia, Jack Ma, yang menekankan pada optimisme terhadap masa depan dan apa yang bisa dilakukan agar sukses memberi manfaat kepada umat manusia. Pendekatan ini menginspirasi penulisan memori akhir masa jabatan, menggunakan pendekatan aspek *discovery*, *adventure*, *momentum*, dan *outlook* dalam menyusun pencapaian kinerja Kementerian Kominfo lima tahun ke belakang.



## **Cara Suara Wicara Chief RA**

Penyunting : F. Bambang Irawan

Buku "*Cara, Suara, Wicara Chief RA*", mengumpulkan berbagai ujaran khas Chief RA yang menggambarkan pandangan dan nilai-nilai positif yang beliau anut dalam bekerja dan melayani masyarakat, yang selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan baik di forum internal maupun forum umum. Ujaran singkat tentang "Anda yang Ubah atau Anda yang Saya Ubah", "Not Claimed, But Earned", Filosofi Tumpeng, dan "Dont reinvent the wheel" menjadi sebagian dari tulisan-tulisan menarik yang mengisi buku ini.



## **Chief Rudiantara di Antara Kita ASN Kominfo Menulis tentang Chief RA**

Penyunting : Uki M. Kurdi

"*Chief Rudiantara di Antara Kita*" berisi ungkapan hati para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kominfo yang mengungkapkan kesan, perasaan, juga harapan yang mereka rasakan selama Chief RA berada di antara mereka; bekerja sama, memotivasi, dan menginspirasi mereka.

Para ASN menyorot bagaimana Menkominfo tidak mempermasalahkan cara berpakaian stafnya dalam tulisan "*Performance over Appearance, and a Story about Sneakers*", prinsip tentang pentingnya berpikir secara *no box* dalam hal sistem birokrasi dalam tulisan "*Chief RA is Out of Ordinary*", hingga keberanian Chief RA mengubah konsep baru dalam sidang TELMIN, memastikan para Menteri Kominfo se-ASEAN yang menjadi penentu arah kebijakan pengembangan ICT.



## **"RI" in the Digital "RA" - Gagasan dan Pandangan Chief RA**

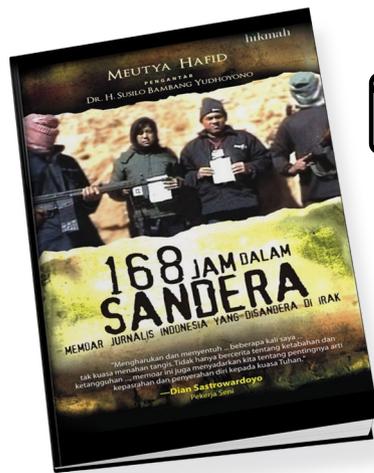
Penyunting : F. Bambang Irawan

Buku ini memuat gagasan dan pandangan Chief RA yang tercetus pada forum-forum yang pernah dihadiri. Artikel-artikel dalam buku ini terdiri dari pidato, kuliah umum, maupun kata pengantar buku, yang tersebar dalam berbagai terbitan dan kesempatan. Buku ini disusun karena dalam pemikiran tersebut, tertulis benang merah kebijakan dan pemikiran strategis Chief RA bagi Indonesia selama lima tahun ini, juga visinya untuk tahun-tahun mendatang yang umumnya mengusung satu tema tunggal yaitu digitalisasi.



# PERCAYALAH

Masih Ada Kesempatan dalam Kesempitan  
Sebuah Memoar Meutya Hafid dalam Penyanderaan



## 168 JAM DALAM SANDERA, MEMOAR JURNALIS INDONESIA YANG DISANDERA DI IRAK

Judul : 168 Jam dalam Sandera

Penulis : Meutya Hafid

Penerbit : Hikmah (PT Mizan Publika)

Tebal : 280 Halaman

Cover : Soft Cover

Oleh : Nurul Hidayah Putri  
Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik  
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Ketika berdinass atau bertugas ke luar kota, setiap pekerja dengan risiko tinggi, baik pekerja tambang, pekerja kilang minyak, PNS, apalagi wartawan, mengerti betul dengan resiko yang siap harus dihadapi nantinya. Mulai dari risiko jadwal penerbangan yang tertunda, intensitas bertemu keluarga yang minim (hanya sebulan sekali, bahkan hingga setahun sekali), ancaman keselamatan jiwa, ancaman keselamatan tempat bekerja, hingga dirundung karena menulis atau berpendapat yang sama dengan pemerintah yang sah.

Namun siapa yang menyangka, kalau suatu waktu di tempat penugasan yang rawan konflik atau peperangan, kita akan berhadapan langsung (*fis to fis*, jika meminjam istilah Tukul Arwana) dengan segerombolan perompak maupun pemberontak. Mungkin sebagai tentara atau wartawan perang, hal ini sudah biasa. Buat saya yang hanya warga biasa, menyimak kisah penyanderaan dua wartawan MetroTV, Meutya Hafid dan Budiyanto ketika meliput di wilayah perang atau konflik, rasa-rasanya seperti menonton drama yang menegangkan. Visualisasi drama penyanderaan ini tentu lebih seru daripada menonton drama di televisi atau bioskop, karena disajikan dalam bentuk tulisan, melalui buku *168 Jam dalam Sandera, Memoar Jurnalis Indonesia yang Disandera di Irak*. Memoar ini ditulis sendiri oleh salah satu wartawan MetroTV yang disandera, Meutya Hafid.



Memoar setebal 255 halaman ini dibagi menjadi 12 Bab. Jadi kira-kira, kalau menilik dari lamanya penyanderaan, yaitu 168 jam, maka setiap bab berisi kisah Meutya dan Budi selama 14 jam (*Benar kan ya, hitung-hitungan Matematika saya? Kalau salah, harap maklum*). Pembabakan kisah penyanderaannya seperti ini:

## Bab 1

---

Jangan Berontak,  
Jangan Bergerak!

## Bab 2

---

Aku Benar - Benar  
Diculik!

## Bab 3

---

Gua Terpencil di  
Tengah Gurun

## Bab 4

---

Selamat Jalan,  
Budi

## Bab 5

---

Memelihara  
Harapan

## Bab 6

---

Harapan  
yang Pupus

## Bab 7

---

Hilangnya  
Kesabaran

## Bab 8

---

Kabar  
Pembebasan

## Bab 9

---

Pembebasan  
yang Berliku

## Bab 10

---

Tegang Tiada  
Akhir

## Bab 11

---

Aku  
Pulang

## Bab 12

---

Kapan  
Harus Berhenti?

Nah, cukup terbayang kan, bagaimana naik-turunnya kisah (*bukan kasih*) kedua wartawan televisi berita ini selama disandera dalam penugasan peliputan jurnalistik mereka?

Kisah berawal dari penugasan Meutya Hafid ke Irak dalam Pemilu, perayaan pesta demokrasi pertama mereka, setelah pemerintahan Saddam Hussein jatuh. Padahal sebelumnya, Meutya baru saja pulang dari liputan bencana tsunami di Aceh. Pemilihan Meutya karena ia dianggap seorang wartawati yang tangguh, energinya tidak habis-habis, cara melobi juga bagus. Budiyanto, yang pada saat itu menjabat sebagai koordinator juru kamera MetroTV, didaulat menjadi juru kamera mendampingi Meutya. Ia dianggap sudah terbiasa dengan medan peliputan di Irak karena baru saja selesai peliputan di Irak, ketika Saddam Hussein masih berkuasa.

Namun siapa nyana, peliputan dadakan ini berbuah pengalaman yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup. Sesampainya di Baghdad, Irak, tepatnya di POM bensin, rombongan Meutya, Budiyanto, dan pemandu bernama Ibrahim dihadang oleh anggota Mujahidin. Kelompok gerilyawan ini dalam istilah pemerintah Amerika Serikat, merupakan pemberontak dan terkenal sering meledakkan kawasan tertentu di Irak dengan menggunakan bom mobil. Setelah

“

**... untuk meliput dalam daerah konflik ternyata butuh tak sekadar keahlian dan keberanian, tetapi juga butuh wisdom, kedewasaan untuk menilai kapan harus maju terus, kapan harus berhenti.**

Meutya Hafid, Wartawan

”

dari POM bensin, mereka digiring ke goa yang berada entah di gurun pasir sebelah mana. Mereka terus diselidiki mengenai afiliasi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, selama peliputan di Irak pun, keduanya harus mengatasi kecurigaan kelompok koalisi karena tidak sengaja melewati dan meliput pos rahasia mereka, sehingga dianggap mata-mata. Dalam duka peliputan yang berakhir dalam penyanderaan, mereka selalu ingat dengan istilah, “Kalau takut risiko, pergi saja dari Irak!”

Tentunya kita sudah tahu bagaimana akhir drama penyanderaan ini, yang sangat menyita perhatian kita di tahun 2005. Namun drama ketegangan hingga penguakan sisi humanisme penyandera hanya dapat kita ikuti di buku ini. Pada akhirnya, wartawan yang tangguh juga manusia, yang pada titik tertentu bisa putus asa. Di sisi lain, sosok gerilyawan juga manusia. Mereka sebenarnya hanya butuh pengakuan bahwa yang diperjuangkannya adalah demi kebaikan. Sisi inilah yang ternyata mampu menjadi senjata bagi kedua wartawan ini untuk bertahan dengan selamat dalam penyanderaan. Tidak luput juga berbagai upaya dari kantor berita yang menugaskan mereka,



hingga Presiden RI saat itu untuk membebaskan aset wartawan pemberaninya.

Saking serunya kisah ini, saya jadi terbayang apakah memungkinkan memoar ini diangkat menjadi film komersil, bukan hanya film dokumenter?

## Keunggulan

Kegamblangan kisah dalam memoar ini ditulis sesuai permintaan pemimpin gerilyawan Mujahidin, Rois dalam pembebasan keduanya, “Tolong ceritakan (kejadian selama penyanderaan ini) apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan.”

Memoar ini dilengkapi dengan kisah penyanderaan dari sudut pandang lainnya. Seperti layaknya laporan jurnalistik, memoar ini berusaha menampilkan dua sisi, bahkan tiga sisi cerita, yaitu dari sisi Pemimpin Redaksi Metro TV tahun 2004 – 2005, Don Bosco Selamun, dan Juru Bicara Departemen Luar Negeri pada saat itu, Marty M. Natalegawa. Saya sih, paling suka bagaimana Pak Marty berkisah betapa ia berulang kali

berjanji akan melakukan semampu apapun untuk membawa keduanya pulang ke Indonesia. Baginya, *failure is not an option*.

Selain itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan pengantar pada buku ini. Tentunya ini menjadi pertanda betapa seriusnya penanganan penyanderaan kedua wartawan tersebut.

Berdasarkan kisah ini, saya jadi semakin mengerti lika-liku diplomasi yang harus ditempuh dalam penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri. Angkat topi untuk semua jajaran pemerintah kala itu.

## Kelemahan

Buku ini nyaris tanpa kekurangan, karena ceritanya gamblang, dilihat dari berbagai sisi. Bahkan mengajarkan cara bertawakal dan pantang menyerah dalam kondisi terpojok atau sesempit apapun. Selalu masih ada kesempatan di dalam kesempitan sesempit apapun.

## Tentang Penulis

Saya rasa semua orang telah mengenal sosok Meutya Hafid, wartawan yang kini menjadi politisi, dan Budiyanto, juru kamera di Metro TV, kurang lebih semenjak drama penyanderaan mereka.

# MENTERI KABINET INDONESIA MAJU



**MUHADJIR  
EFFENDY**

Menteri Koordinator  
Bidang Pembangunan  
Manusia dan  
Kebudayaan



**MOHAMMAD MAHFUD**

Menteri Koordinator  
Bidang Politik Hukum  
dan Keamanan



**LUHUT BINSAR  
PANDJAITAN**

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman  
dan Investasi



**AIRLANGGA  
HARTARTO**

Menteri Koordinator  
Bidang Perekonomian

**4 MENTERI  
KOORDINATOR**

KOORDINATOR  
KOORDINATOR

# BIDANG

## 30 MENTERI BIDANG



**PRATIKN**

Menteri Sekretaris  
Negara



**TITO KARNAVIAN**

Menteri Dalam Negeri



**RETNO LESTARI  
MARSUDI**

Menteri Luar Negeri



**PRABOWO  
SUBIANTO**

Menteri Pertahanan



**NADIEM MAKARIM**

Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan



**YASONNA LAOLY**

Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia



**SRI MULYANI  
INDRAWATI**

Menteri Keuangan



**ARIFIN TASRIF**

Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral



**AGUS SUPARMANTO**

Menteri Perdagangan



**AGUS GUMIWANG  
KARTASASMITA**

Menteri Perindustrian



**SYAHRUL  
YASIN LIMPO**

Menteri Pertanian



**SITI NURBAYA**

Menteri Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan



**BUDI KARYA SUMADI**

Menteri Perhubungan



**EDHY PRABOWO**

Menteri Kelautan  
dan Perikanan



**IDA FAUZIAH**

Menteri  
Ketenagakerjaan

# BIDANG



**BASUKI HADIMULJONO**

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**ABDUL HALIM ISKANDAR**

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



**TERAWAN AGUS PUTRANTO**

Menteri Kesehatan



**JULIARI BATUBARA**

Menteri Sosial



**WISHNUTAMA**

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**BAMBANG BRODJONEGORO**

Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset Inovasi Nasional



**TJAHJO KUMOLO**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**FACHRUL RAZI**

Menteri Agama



**SUHARSO MONOARFA**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas



**GUSTI AYU BINTANG DARMAVATI**

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**JOHNNY G. PLATE**

Menteri Komunikasi dan Informatika



**SOFYAN DJALIL**

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional



**ZAINUDIN AMALI**

Menteri Pemuda dan Olahraga



**TETEN MASDUKI**

Menteri Koperasi dan UKM



**EROCK THOHIR**

Menteri Badan Usaha Milik Negara

# BIDANG



**PRAMONO ANUNG**  
Sekretaris Kabinet



**MOELDOKO**  
Kepala Staf  
Kepresidenan



**BAHLIL LAHADALIA**  
Kepala Badan  
Koordinasi  
Penanaman Modal

## 4 PEJABAT SETINGKAT MENTERI



**ST BURHANUDDIN**  
Jaksa Agung

4 PEJABAT  
SETINGKAT MENTERI

# WAKIL MENTERI KABINET INDONESIA MAJU



**BUDI GUNADI SADIKIN**

Wakil Menteri BUMN



**SAKTI WAHYU  
TRENGGONO**

Wakil Menteri  
Pertahanan



**ZAINUT TAUHID**

Wakil Menteri  
Agama



**MAHENDRA SIREGAR**

Wakil Menteri  
Luar Negeri



**SUAHASIL NAZARA**

Wakil Menteri  
Keuangan



**JERRY SAMBUAGA**

Wakil Menteri  
Perdagangan



**JOHN WEMPI  
WETIPO**

Wakil Menteri  
PUPR



**BUDI ARIE SETIADI**

Wakil Menteri Desa,  
Pembangunan  
Daerah Tertinggal  
dan Transmigrasi



**SURYA TJANDRA**

Wakil Menteri Agraria  
dan Tata Ruang / BPN



**ALUE DOHONG**

Wakil Menteri  
Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan



**KARTIKA  
WIRJOATMODJO**

Wakil Menteri BUMN



**ANGELA HARY  
TANOESOEDIBJO**

Wakil Menteri Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif

# 7 PERINTAH PRESIDEN UNTUK KABINET INDONESIA MAJU

**1**

Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi!

**2**

Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden-Wakil Presiden!

**3**

Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!

**4**

Jangan terjebak rutinitas yang monoton!

**5**

Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi delivered!

**6**

Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya!

**7**

Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan!



# DAMO

## SEMANGAT AKSELERASI EKOSISTEM DIGITAL INDONESIA

Lima tahun terasa sangat singkat untuk menyelesaikan kerja di sektor komunikasi dan informatika. Namun, ada estafet yang tetap berjalan: menjadi fasilitator dan akselerator ekosistem digital Indonesia.

“Kita tahu saat itu adalah bahwa masyarakat kita merupakan *“early adopters”* yang sangat baik bagi teknologi dan layanan-layanan di Internet, terutama media sosial, yang diselenggarakan di atas jaringan *internet mobile*,” tulis Rudiantara dalam Memori Pertanggungjawaban 5 Tahun sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Kerja bertajuk Discovery, Adventure, Momentum dan Outlook.

Bagi Rudiantara, masa transisi itu menjadi peluang agar Pemerintah bisa memainkan kunci lebih dari sekadar regulator. Bahkan dalam setiap kesempatan, Chief RA, panggilan akrabnya selalu menekankan bahwa lembaga yang dipimpinnya bersedia menjadi fasilitator bahkan akselerator.

“Masyarakat kita juga tak kalah sigap dalam mengantisipasi layanan-layanan baru yang bersifat disruptif namun memiliki nilai tambah yang besar bagi mereka. Kemudian muncul bisnis baru yang digagas orang muda. Dalam tikungan tajam digitalisasi itu, pemerintah juga harus mengambil langkah yang pas, sesuai dengan perkembangan. Kominfo

yang sebelumnya menyandang predikat dan fungsi sebagai regulator tidak bisa lagi hanya berkuat pada peran yang relatif pasif itu jika hendak menyediakan ruang yang kondusif bagi perkembangan ekosistem digital. Dalam tikungan tajam digitalisasi itu, pemerintah juga harus mengambil langkah yang pas, sesuai dengan perkembangan,” ungkap Rudiantara.

Dinamika teknologi finansial sektor perbankan, tantangan tenaga kerja di masa depan berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0 atau talenta digital, sampai kampanye melawan hoaks, bahkan model bisnis startup digital hingga perkembangan gim online menjadi tantangan baru sektor komunikasi dan informatika.

Oleh karena itu, sejak lima tahun lalu, prioritas kerja Kementerian Kominfo diarahkan sejalan dengan garis besar prioritas pembangunan nasional yang selama ini menggenjot pembangunan infrastruktur TIK untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pembangunan sumberdaya manusia menjadi fokus, salah satunya ditopang dengan upaya Kementerian Kominfo mendorong akselerasi talenta digital.



## DISCOVERY

Kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi penyediaan dan pembangunan infrastruktur TIK. Negara kepulauan yang wilayahnya membentang sangat luas, berbeda dengan kebanyakan negara-negara lain, misalnya saja seperti negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang relatif lebih mudah untuk menggelar jaringan serat optik. Belum lagi soal pembiayaan yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun, ditemukan solusi dengan skema pembiayaan dengan bentuk KPBU dan *blended finance*.

“Teknologi 4G hadir lebih cepat di Tanah Air juga berkat “discovery” dalam penataan frekuensi. Sekitar tahun 2014-an, Indonesia pernah disangsikan dapat segera menggelar teknologi 4G karena kondisi penataan frekuensi yang masih kurang efisien,” cetus Rudiantara.

Ternyata Kominfo berhasil merealisasikan pada tahun 2014 itu juga. 4G bisa diselenggarakan dan berjalan relatif mulus.

Bahkan, otomatisasi perizinan bisa berlangsung dengan melakukan

rekayasa ulang terhadap mekanisme perizinan yang diselenggarakan, yang tidak bernilai tambah dipangkas, diotomisasi, atau diganti dengan teknologi.

Sesuai dengan Agenda Nawacita ke-2 bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; serta Agenda Nawacita ke-4 memperkuat reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, maka perlu diwujudkan dengan layanan publik yang baik.

## ADVENTURE

Masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur menemukan solusi dengan program kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau *public private partnership* (PPP). Skema KPBU juga bisa disebut sebagai *adventure* karena merupakan inovasi baru. Keputusan untuk mengambil skema ini mengandung unsur petualangan merambah skema-skema baru.

“Kominfo termasuk kementerian yang terdepan dalam skema pembiayaan ini dengan menerapkannya pada proyek Palapa Ring dan Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA),” tulis Rudiantara.

Sementara itu, kebijakan registrasi Prabayar juga merupakan kebijakan yang berisiko tinggi karena merupakan kerja yang menyangkut ratusan juta nomor dan data

pelanggan. Namun hal itu tetap harus dilakukan karena Registrasi Kartu SIM Prabayar menjadi peluang bagi penyehatan industri telekomunikasi, terutama untuk menghindari berbagai bentuk kejahatan yang mungkin terjadi.

“Registrasi kartu Prabayar akan ikut menyehatkan industri telekomunikasi karena penyedia jasa layanan tidak perlu mengeluarkan dana banyak untuk mencetak kartu Subscriber Identity Module atau SIM baru. Setiap tahun, industri seluler membeli kartu SIM lebih 500 juta, padahal yang dipakai pelanggan pada akhirnya hanya sekitar 100 juta,” tuturnya.

Kementerian Kominfo ikut mendorong pengurangan komponen impor dalam perangkat TIK. Melalui strategi untuk menaikkan syarat-syarat TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) bagi barang yang masuk ke Tanah Air akhirnya berkontribusi dalam menahan penguatan kurs dollar.



# MOMENTUM



Kementerian Kominfo menciptakan banyak momentum dalam 5 tahun belakangan ini.

Sebagian besar momentum tersebut dicapai berkat pemilihan waktu yang tepat untuk beranjak dari sekadar menjadi regulator ke peran sebagai fasilitator dan akselerator.

Ada Gerakan 1000 Startup dan Next Indonesian Unicorn (Nexticorn) yang bisa dimanfaatkan dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan digital. Kedua fasilitasi tersebut bertujuan tidak hanya untuk melahirkan startup yang berkualitas, namun juga mampu berkontribusi terhadap solusi atas berbagai permasalahan sosial di Indonesia.

Bersama para pemain di ekosistem digital, Kominfo berinisiatif menyusun petajalan (*roadmap*) e-commerce yang merupakan salah satu cara menjaga agar ekonomi

digital berjalan pada koridor yang tepat guna mencapai target nilai US\$ 130 miliar pada tahun 2020. Peta jalan ini sudah ditetapkan sebagai keputusan pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 dan juga diadopsi Kementerian Koordinator Bidang Keuangan untuk menjadi Paket Kebijakan Ekonomi XIV.

Pemerintah juga tidak boleh kehilangan momentum dalam meningkatkan literasi digital masyarakat yang sedang dibombardir oleh banjir bandang informasi. Gerakan Literasi Digital "Siberkreasi" Kominfo juga digelar untuk mengatasi penyebaran informasi negatif, baik melalui pencegahan pada tingkat hulu

maupun penindakan pada tingkat hilir. Pada tingkat hulu, edukasi dan literasi tentang informasi dan konten digital menjadi fokus pemerintah melalui Kominfo.

Saat ini juga merupakan momentum yang tepat untuk melayani masyarakat dengan pendekatan teknologi. Kominfo juga berkomitmen menjadi fasilitator bagi pengembangan kota cerdas di seluruh Indonesia melalui penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City yang bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, industri teknologi informasi, dan pemerintah daerah yang terlibat.



## OUTLOOK



Ekonomi digital adalah masa depan kita karena diperkirakan pada tahun 2020, akan mencapai 11% dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Angka itu juga berarti lebih besar dibandingkan dengan ekonomi seluruh negara ASEAN dijadikan satu.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi digital secara global sangatlah cepat yakni hampir dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2016. Ekonomi digital juga tumbuh 2,5 kali lebih cepat daripada GDP global selama periode tersebut. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan dan investasi digital selama 10 tahun.

Ke depan, diperkirakan bahwa pada tahun 2025 ekonomi digital akan menjadi US\$ 23 triliun secara global atau 24,3% dari PDB global.

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan tersebut, Kominfo juga menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship untuk

menyediakan tenaga terampil dalam bidang digital. Program ini berangkat dari pemikiran bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015- 2030, Indonesia membutuhkan 9 juta digital talent atau sekitar 600 ribu orang setiap tahun.

Digital Talent Scholarship tersebar di 25 kota di 20 provinsi, termasuk mencapai Jayapura dan Lhokseumawe. Program ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Untuk menyelenggarakan program ini, Kominfo bekerja sama dengan 31 perguruan tinggi, 23 politeknik dan 4 perusahaan teknologi global, antara lain AWS, Cisco, Google dan Microsoft.

Jalan pembangunan sektor komunikasi dan informatika masih terbentang. Tak bisa hanya satu tahun atau lima tahun. Dinamika dan tantangan akan selalu ada.

## Mengapa DAMO?

Bermula dari ungkapan guru pemasaran internasional, Hermawan Kartajaya. Ia menggunakan kerangka DAMO (Discovery, Adventure, Momentum, dan Outlook) untuk melihat secara *helicopter view* atas tahapan yang dicapai dari bisnis. Adalah Alibaba, salah satu perusahaan digital terbesar di Tiongkok dan dunia yang menerapkan DAMO. Mulai dari Discovery, yaitu bagaimana menemukan teknologi demi kemaslahatan umat manusia; Adventure, yaitu bagaimana membangun kompetisi melalui kolaborasi; Momentum, yaitu bagaimana memanfaatkan momentum harus dengan cara produktivitas bukan sekadar reaktivitas, dan Outlook yaitu bagaimana melihat persoalan dari kacamata yang lebih luas.

Alih-alih menggunakan kerangka berpikir VUCA (*volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*) yang lahir dari strategi militer Barat, DAMO yang lahir dari pemikir dan pelaku bisnis digital Asia kelas wahid saat ini, Jack Ma, lebih menawarkan optimisme terhadap masa depan dan apa yang bisa dilakukan agar sukses memberi manfaat kepada umat manusia. Nama DAMO sendiri pun juga memiliki roh daya tahan dan kekuatan, karena nama itu juga merupakan salah satu jenis seni bela diri Tiongkok.

## ESTAFET BANGUN SEKTOR KOMINFO



*PEMBANGUNAN SUMBERDAYA  
MANUSIA MENJADI FOKUS UTAMA  
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-  
MA'RUF AMIN*

**R**Rudiantara, kini telah resmi melepas masa jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019. Posisi Menkominfo selanjutnya resmi dijabat oleh Johnny G. Plate. Menyusul acara serah terima jabatan (Sertijab) yang dilaksanakan di Ruang Anantakupa, Gedung B Kementerian Kominfo itu, Rudiantara mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memiliki banyak pekerjaan rumah (PR).

Rudiantara mengatakan "PR" yang paling penting saat ini adaah soal Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. "Sektor kita punya tantangan. Perlindungan data pribadi. Kominfo sudah siapkan rancangan dan sudah tanda tangan, tapi harus harmonisasi dengan undang undang lain," kata Rudiantara, Rabu (23/10/2019).



## NAKHODA BARU KOMINFO

Sejak diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kominfo periode saat ini hingga 5 tahun ke depan, Johnny Gerard Plate langsung bergerak cepat. Johnny yang merupakan seorang pengusaha yang banyak bergerak di bidang alat-alat perkebunan, tercatat pernah memimpin beberapa perusahaan. Diantaranya PT Bima Palma Nugraha dan PT. Mandosawo Putratama Sakti. Tidak hanya itu, lulusan Universitas Atma Jaya ini juga sempat berkecimpung di dunia penerbangan.

Ia pernah menjadi bagian dari bisnis Air Asia pada tahun 2007-2015. Ia pun tercatat pernah bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Sekretaris Jenderal dari 2017 hingga 2019. Karir Johnny bersama Nasdem terbilang

moncer. Kini, Johnny mengemban amanah baru sebagai Menkominfo. Rudiantara, juga telah menitipkan sejumlah program yang belum bisa ia realisasikan selama periode ia menjabat. Seperti di antaranya peningkatan infrastruktur, konsolidasi operator, hingga undang-undang perlindungan data pribadi. Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah Kominfo yang belum selesai. Saat itu, Rudiantara mengatakan, Indonesia tertinggal dari negara tetangga dalam membangun *Information and Communications Technology (ICT)*.

## PRIORITAS

PERLINDUNGAN  
RUU PDP  
DATA PRIBADI  
REVISI  
UU PENYIARAN

Dari pengalaman kerjanya itu, Menkominfo Johnny telah menyusun beberapa program yang menjadi prioritasnya. Sejak awal memimpin Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menyatakan RUU PDP dan revisi UU Penyiaran bakal menjadi prioritas lembaga yang dipimpinnya. "Hanya saja, draf RUU PDP masih perlu direvisi oleh Kominfo setelah dikoreksi oleh Kemendagri dan Kejakug pada pertengahan Oktober lalu," bebarnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (05/11/2019).

Menurut Menteri Kominfo, RUU PDP sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan data masyarakat.

■

*Pemerintah sangat berkepentingan untuk memastikan hak setiap warga negara terlindungi dan bisa dijalankan dengan baik. Apabila RUU Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam Prolegnas 2020 dan Prolegnas 2020-2024. Saya minta yang terhormat Komisi I agar UU menjadi prioritas diselesaikan dalam waktu cepat.*

Menteri Johnny menambahkan, RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibahas di lingkup legislatif sekitar enam bulan, yakni Januari hingga Juli 2020. Selanjutnya, beleid ini ditargetkan keluar dan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2020. Dalam RUU Data Pribadi, Kementerian Kominfo mengusulkan adanya standarisasi aturan yang secara prinsip menjamin keamanan data masyarakat. Selain itu, beleid bakal mengatur tatakelola terhadap proses perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Menurut Menteri Johnny, Kominfo perlu mendorong terbitnya RUU Perlindungan Data Pribadi lantaran saat ini aturan data pribadi di Indonesia masih acak dan tersebar di berbagai jenis beleid. "Karena itu kita perlu undang-undang yang mensinkronkan perlindungan data pribadi," ungkapnya.

## BANGUN 3.447 BTS PADA 2020



Terbaru, Kementerian Kominfo, kata Menkominfo Johnny, berencana membangun 3.447 Base Transceiver Station (BTS) pada 2020. Langkah itu diambil untuk mendukung terlaksananya program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia. "Di samping existing, Kominfo juga sudah lakukan pembangunan backbone serat optik Palapa Ring, juga bangun BTS di wilayah Indonesia Timur dan Tengah yang belum terjangkau. BTS 5000, sudah ada 1.500 dan 3.447 lagi pada 2020," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart City, Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Menkominfo mengatakan peluncuran satelit diharapkan dapat berlangsung pada 2021. "Paling lambat, 2022 sudah dilakukan sehingga 2024 satelit bisa mulai berfungsi," katanya.

Saat ini Indonesia telah memiliki 100 kota cerdas. Angka itu terus bertambah sejak 2017, saat Indonesia hanya memiliki 25 kota cerdas. Kemudian pada 2018, jumlah itu bertambah sebanyak 50 kota cerdas. Begitu pula pada 2019, kota cerdas di Indonesia bertambah 25 kota.

2017 25 Kota Cerdas

2018 +50 Kota Cerdas

2019 +25 Kota Cerdas



Salah satu fokus Kementerian Kominfo dalam pengembangan SDM yakni melalui program Digital Talent Scholarship. Pada tahun 2019, Kominfo rekrut 25 ribu talent, sementara untuk 2020 akan bertambah menjadi 50 *digital talent scholarship*.

Tahun 2015 hingga 2030 Indonesia sekarang-kurangnya membutuhkan 113 juta talenta digital. “Dari proyeksi kesiapan kita, Indonesia 2030 akan menghasilkan sekitar 104 juta *digital talent* atau kekurangan sekitar 9 juta *digital talent*,” kata Johnny di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Johnny berharap, dengan dukungan berbagai pihak maka tentunya Indonesia telah memiliki talenta-talenta yang unggul dalam menghadapi tantangan kedepannya. “Kita punya tugas bersama-sama untuk menghadirkan agar 9 juta kekurangan digital talent bisa kita penuhi. Jika tidak, maka tentu ruang itu akan diisi oleh rekan-rekan dari negara sahabat kita,” ujarnya. (hm.ys)

Pemerintah, melalui Kominfo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berencana menambah kota-kota lain untuk menjadi kota cerdas agar mendorong perekonomian Tanah Air. “Kominfo sudah bangun infrastruktur sampai ke desa-desa. Kami harapkan *electronic marketplace* bisa lebih gampang dijangkau oleh nelayan, petani, dan seterusnya,” kata Johnny. “Dengan demikian, partisipasi produk-produknya bisa masuk ke pasar, sehingga bisa lebih cepat jangkauan konsumen,” ucapnya.

Johnny menambahkan pemerintah akan memperhatikan dan berfokus pada pembangunan infrastruktur komunikasi di wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

Fokus pembangunan infrastruktur itu bertujuan mengurangi disparitas pembangunan digital di diseluruh wilayah Indonesia. “Gerakan menuju 100 Smart City telah mendorong banyak pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan yang memudahkan masyarakat,” pungkasnya.

## GENJOT TALENTA DIGITAL



## PROJECT A OVERVIEW



COMPLETED

PARTIALLY COMPLETED

DELAYED / BEHIND TARGET

### 1 GERAKAN NASIONAL 1000 STARTUP DIGITAL

-  Pembentukan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital
-  Mendirikan organisasi yang menaungi GN 1000 Startup Digital
-  400 startup baru yang potensial dari program GN 1000 Startup Digital

### 2 E-COMMERCE - USO FUND

-  Mendukung penggunaan dana Universal Service Obligation (USO) untuk menunjang ekosistem ekonomi digital, terutama di wilayah 3T
-  Menetapkan skema pengalokasian channel hibah pemerintah/USO/ subsidi pemerintah untuk mendukung UMKM digital dan platform startup e-commerce, khususnya di wilayah 3T

### 3 SIVION

-  Root CA (Certification Authority) tersertifikasi internasional
-  CA Pemerintah Tersertifikasi (BPPT dan BSSN)
-  CA Private Tersertifikasi (Peruri, Privy.id, dan VIDA)
-  Tanda Tangan Digital Pribadi berjumlah 48.2 M

### 4 UMKM GO ONLINE

-  250.000 UMKM on boarding ke dalam marketplace
-  Meningkatkan active seller dari UMKM yang telah on boarding

### 5 FISHERMAN FARMERS / NELAYAN DAN PETANI GO ONLINE

-  150.000 petani on boarding
-  150.000 nelayan on boarding
-  Meningkatkan active users petani dan nelayan

# PROJECT B OVERVIEW

-  COMPLETED
-  PARTIALLY COMPLETED
-  DELAYED / BEHIND TARGET

## 1 GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

 Persentase tingkat kepuasan masyarakat tentang informasi Program Prioritas meningkat dari 69,43%

## 2 ANALOG SWITCH OFF (ASO)

 Menciptakan digital dividend dari diubahnya spektrum frekuensi TV, melalui migrasi TV analog ke TV digital

## 3 E-GOVERNMENT

 274 Pemerintah Daerah (Pemda) teredukasi mengenai keamanan informasi

 Seluruh kota/kabupaten di 5 provinsi teredukasi mengenai PNS Box

 Penambahan 20 instansi pemerintah pengguna data center Kominfo

 Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia menggunakan e-office

## 4 STRATEGIC SECTORS

 Membantu kementerian terkait dalam mencapai KPI (key performance indicator) yang membutuhkan bantuan di aspek digitalisasi

## 5 LAST MILE: INDONESIA MERDEKA SINYAL 2020

 Pengadaan dilakukan ke 5.135 desa

 Pemilihan dan implementasi site untuk base transceiver station (BTS) 671 BTS

 Pemilihan lokasi dan implementasi (AI) didasarkan pada lokasi prioritas (sekolah, rumah sakit, dsb) - 2200

## KABINET INDONESIA MAJU

# JAMIN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA MAYA

Mewujudkan kebebasan berpendapat sebagai bagian kemerdekaan dan hak asai jadi salah satu fokus utama kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Maju. Terutama di dunia maya dan informatika.

Pemerintah memastikan jaminan untuk warga negara dalam hal kebebasan berpendapat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan jaminan atas pemenuhan hak tersebut sebagai hak sipil.

“Negara harus hadir untuk mencegahnya, Kominfo hadir dalam rangka *civil right* dan kebebasan berpendapat, akan hadir untuk mengawal itu dengan baik,” tegas Menteri Kominfo saat menjadi pembicara di “Program Satu Meja” Kompas TV di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Tentu kebebasan bukan diartikan bebas sebebannya. Menurut Menteri Johnny, kebebasan dilaksanakan tanpa menimbulkan kekacauan.

“Kebebasan berpendapat tentunya juga perlu diatur demi terciptanya keamanan dan ketenangan bagi masyarakat lain sebagai bentuk pemenuhan hak lainnya. Pemenuhan hak ini wajib dijaga dengan cara mengurangi indikasi kekacauan yang terjadi agar tidak terus berkembang,” tegas

Menteri Johnny menyatakan kebebasan berpendapat yang menjadi ranah Kementerian Kominfo yang sangat menjadi sorotan adalah dalam penggunaan platform media digital.

“Kemenkominfo punya strategi kerja yang akan diimplementasikan. Startegi ini guna memastikan keamanan masyarakat menjadi semakin terjamin, terutama di ranah dunia

informatika. Kominfo juga mengatakan akan selalu hadir untuk mencegah pelanggaran berupa *hate speech*, radikalisme, terorisme, narkoba, pornografi, perjudian online, hingga transaksi seksual,” paparnya.

Menteri Kominfo menegaskan akan hadir juga untuk melindungi hak-hak rakyat yang menginginkan kedamaian. Menurutnya, kedamaian bernegara akan bisa sangat terusik lantaran banyaknya penyalahgunaan media digital dalam menyampaikan pendapat.

### Kembangkan Peran Warganegara

Ihwal kebebasan berpendapat, dalam pandangan Menteri Johnny, juga mencakup hak setiap warganegara mendapat informasi yang jernih. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus diketahui masyarakat sehingga mereka bisa mengambil peran dari kebijakan tersebut. Menteri Johnny juga tidak mau masyarakat cuma menjadi penonton tanpa mengetahui dengan jelas arah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Menteri Johnny pun mengatakan bahwa pada dasarnya Kominfo memiliki dua fungsi vital. Pertama terkait komunikasi kebijakan negara dan ihwal komunikasi publik.

“Komunikasi kebijakan negara, kebijakan pemerintah ini sangat dibutuhkan agar rakyat, bangsa kita mengetahui ke mana arah gerak pemerintah,” kata Johnny.

Peran berikutnya, Kementrian Kominfo menjelaskan dalam komunikasi publik punya kaitan erat dengan peran pertama sebagai penyambung komunikasi kebijakan pemerintah.



“Yang kedua adalah kita lakukan juga dalam kaitannya dengan komunikasi kepada rakyat atau komunikasi publik, rakyat harus mengetahui apa capaian-capaian negara, jangan sampai rakyat tidak tau capaian negara dan tidak bisa menggunakan atau memantapkannya,” jelas Menteri Johnny seraya menyebutkan hal itu selaras dengan kewenangan Kementerian Kominfo dalam menjalankan fungsi Government Public Relations.

## Untuk Kebaikan Rakyat

Salah satu prioritas Kementerian Kominfo yang akan bermanfaat bagi masyarakat menurut Menteri Johnny adalah upaya terus fokus dan menggenjot pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya di masa jabatan Menteri sebelumnya, Kominfo telah memiliki platform infrastruktur informatika yang sangat baik.

“Kita mempunyai infrastruktur informatika platform, baik yang *fixed platform*, *fixed broadband* melalui serat optik yang begitu

besar dibangun maupun *mobile broadband* yang sudah disediakan,” imbuhnya.

Semua prioritas kebijakan itu ditargetkan agar dapat membantu pemenuhan hak rakyat sesuai dengan amanat konstitusi: menjamin kemerdekaan komunikasi dalam kebebasan berpendapat dan menerima informasi. “Rakyat perlu tau ada di mana dan bagaimana itu hingga mereka bisa menggunakannya,” pungkas Menteri Johnny.



## JOHNNY G. PLATE SIAP IMPLEMENTASIKAN VISI & MISI PRESIDEN

Johnny Gerard Plate dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta (23/10/2019). Terkait penugasannya di bidang Komunikasi dan Informatika, Menteri Johnny menegaskan bahwa sesuai amanat Presiden, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden.

“Nah apa yang menjadi visi para menteri kalau begitu? Dibilang tidak ada. Saya bilang ada juga visi dan misi para menteri adalah tugasnya untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden dan Wapres” katanya saat diwawancarai CNN Indonesia tentang Target Kerja Menkominfo di Era Digital, Jumat (25/10/2019).

Menteri Johnny memandang substansi atau bobot tugas dari komunikasi dan informasi adalah untuk menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi rencana pemerintah, yang akan dilakukan pemerintah sehingga rakyat bisa mengambil bagian dalam gerak langkah dan berkecimpung di dalam pembangunan dan pencapaiannya.

Selain bidang komunikasi, Menkominfo mengatakan tugas lainnya adalah tugas di bidang informatika, yang terkait dengan infrastruktur informatika. “Baik itu yang infrastruktur fixed

base seperti Palapa Ring yang baru saja diselesaikan, atau infrastruktur ditingkat *space-nya* yang disebut dengan infrastruktur langit, satelit-satelit. Ada 8 (delapan) kalau tidak salah di Indonesia” katanya.

Menteri Johnny mengatakan bahwa Indonesia perlu *base stage* dan *base station* untuk *blankspot*, karena banyak *transponder* yang Indonesia miliki untuk menguasai komunikasi di jaringan udara dan juga ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa di-cover.

Johnny berharap infrastruktur telekomunikasi digital yang dimiliki tersebut bisa digunakan tidak saja untuk kepentingan platform-platform unit usaha tapi juga kepentingan rakyat kecil. “Apa yang

menjadi kepentingan rakyat kecil misalnya, petani, peternak dan nelayan dikampung dan desa hasil produksinya itu bisa dihubungkan dengan pasar secara cepat melalui platform-platform digital yang ada” katanya.

Menteri Johnny juga membahas kedaulatan data. Menurutnya, rakyat perlu mengetahui kedaulatan data itu tidak hanya dalam konteks *security* tapi dalam juga konteks *opportunity-nya*, yaitu bagaimana menggunakan data itu untuk kepentingan domestik, kepentingan negara. “Baik untuk negaranya maupun untuk rakyatnya, jadi perlu ada payung hukum terkait dengan kedaulatan data, *data sovereignty*” katanya.





### Digital Economy

Dalam lima tahun ke depan, Menteri Johnny mendorong agar digital economy Indonesia dapat berkembang. “Dalam digital economy, Kominfo akan menyiapkan suatu tempat selancar bagi *digital economy players*. Itu yang akan kita siapkan, akan kita berusaha sekali untuk mendorong itu” katanya.

Presiden Joko Widodo sudah menetapkan target jangka panjang Indonesia di usia seabad 2045. “Kita harapkan pada saat itu *income per kapita GDP* kita pada kisaran 23-24 ribu US Dollar atau setara sekitar 320 juta dollar

per kapita. Kita diharapkan mempunyai GDP sekitar 7 triliun dollar atau negara dengan lima GDP terbesar di dunia” katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Johnny mendorong Kementerian Kominfo yang membawahi digital ekonomi harus betul-betul menyiapkan, menggerakkan fundamen-fundamen khususnya infrastrukturnya, membuka ruang aplikasi-aplikasinya agar ekonomi Indonesia tumbuh dan menjadi *big players*.

“Kalau kita boleh bermimpi ya, punya satu harapan yang besar, kalau Google,

Youtube bisa ada di Amerika, di Indonesia kan sudah bisa ada Go-Jek dan seterusnya, kenapa kita tidak bisa juga mempunyai Google Indonesia yang dimiliki anak negeri?” tanyanya.

Johnny mengatakan bahwa Kementerian Kominfo mendukung digital economy sesuai arahan Presiden dalam mendukung inisiatif dan inovasi anak negeri. “Begitu investasi yang anak negeri mengambil inisiatifnya, inovatifnya, dukung itu. Begitu ada investasi yang dibutuhkan untuk substitusi impor, dukung itu. Begitu ada investasi yang dibutuhkan untuk ekspor, dukung itu” jelasnya.

### Quick Win

Mengenai target kerja, Menteri Johnny mempunyai *quick win* untuk melakukan apa yang bisa cepat dikerjakan. Dijelaskannya, ada beberapa legislasi primer yang sudah hampir selesai tetapi tidak selesai di periode sebelumnya dan Prolegnas seperti Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. “Nah legislasi primer yang sudah selesai ini kan tinggal tendangan pinalti saja. Nah kita perlu barangkali setelah ini setelah DPR selesai dengan seluruh proses politik internal DPR, kita akan melanjutkan proses-proses itu” katanya.

Menteri Johnny juga mengharapkan adanya partisipasi publik secara aktif dalam memberikan masukan – masukan terhadap Rancangan Undang-Undang. “Nanti kalau sudah sampai di ujung jangan sampai kita nanti ditarik balik lagi ke titik awal, tentu saya harapkan segeralah itu keterlibatan partisipasi publik di saat awal. Kalau sudah lengkap, kita dorong di Parlemen *speed up*, percepat di sana. Itu yang pertama”.

Soal perlindungan data pribadi, Johnny mengatakan harus ada payung hukumnya karena di era digital begitu cepatnya data berpindah. “Itu bisa berbahaya kalau data pribadi tidak dilindungi” katanya. Di samping itu, Johnny juga mengatakan harus ada ruang bagaimana men-*sharing* data pribadi.

“Saya ambil contoh dokter. Kita pergi ke dokter, sakit, nanti dokternya bilang, ‘wah, ini perlu ada yang lain lagi’. Pergi ke dokter yang lain, kalau data ini tidak *dishare*, dokter ini tidak bisa bekerja juga, harus *dishare* juga. Pada saat men-*share* data ini



melanggar aturan ngga? Nah inikan harus dibuat legislasi primer nya dengan baik. Saya kira itu yang akan kita lakukan secara cepat” jelasnya.

Menteri Johnny akan melakukan review menyeluruh, mengkategorikan apa yang harus segera dilakukan sekarang dan untuk jangka panjang untuk lima tahun. Namun hal ini, menurutnya, harus disesuaikan dengan arah visi dan misi serta program Presiden.

# Tentang Menteri Komunikasi dan Informatika

## “*Salus Populi Suprema Lex*”

Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.

- Marcus Tullius Cicero

Pepatah milik politikus Romawi ini menjadi motto hidup Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate. Sebelum dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Kominfo, pria kelahiran Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat periode 2017 – 2019, sekaligus Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2014 – 2019, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I.

Namanya mungkin sedikit asing bagi industri telekomunikasi dan digital. Posisinya sebagai Anggota Komisi XI membuatnya lebih banyak bersentuhan dengan bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan. Selama lima tahun terakhir ia lebih banyak bertemu mitra kerja di ketiga bidang tersebut, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun daftar panjang riwayat organisasi yang ia miliki

membuat kepemimpinannya tak diragukan lagi. Di tahun 2005, Menteri Johnny G. Plate dipercaya sebagai Komisaris di 3 (tiga) perusahaan dalam waktu bersamaan, yaitu Komisaris PT Tanjung Jati B (TJB) Power Services, Komisaris PT Indonesia Air Asia, dan Komisaris Utama PT Aryan Indonesia.

Sejak itu karirnya terus melesat, di mana pada tahun 2006 ia dipercaya sebagai Direktur Utama Bima Palma Group hingga tahun 2013. Tak hanya itu, di tahun 2007 Menteri Johnny pun diangkat sebagai Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti. Ia juga tercatat menjadi Direktur Utama PT Gajendra Ahi Sakti sekaligus Group CEO PT Bima Palma Nugraha di tahun 2008. Hingga di tahun 2012, ia diangkat sebagai Direktur Utama PT Air Asia Mitra Investama.

Sejak bergabung dengan Partai Nasional Demokrat di 2013, Menteri Johnny pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai dan Ketua Fraksi Partai, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat di tahun 2017 hingga 2019.



# Johnny Gerard Plate



Tempat, Tanggal Lahir:

Ruteng, 10 September 1956

motto:

***Salus Populi  
Suprema Lex***  
(Kesejahteraan Rakyat  
adalah Hukum Tertinggi)



## Pendidikan

1963 - 1969  
**SDN REO I,**  
NTT

1970 - 1972  
**SMP PIUS  
XII KISOL,**  
Manggarai, NTT

1973 - 1975  
**SMAN 1 RUTENG,**  
Manggarai, NTT

1979 - 1986  
**S1 UNIVERSTIAS  
KATOLIK ATMA JAYA**  
JAKARTA



## Karir

2005  
**Komisaris**  
**PT Indonesia Air Asia**

2006 - 2013  
**Direktur Utama**  
**Bima Palma Group**

2008  
**Group CEO**  
**PT Bima Palma Nugraha**

2012  
**Direktur Utama**  
**PT Air Asia Mitra**  
**Investama**

**Wakil Ketua**  
**Partai Nasional**  
**Demokrat/Nasdem**

**Ketua Fraksi**  
**Partai Nasional**  
**Demokrat/Nasdem**

2014 - 2019  
**Anggota DPR RI**  
**Komisi XI**

2017 - 2019  
**Sekjen Partai Nasional**  
**Demokrat/ Nasdem**

2019 - sekarang  
**Menteri Komunikasi**  
**dan Informatika**



# PEKAN PERTAMA BANG JOHNNY

**RABU,**

**23  
Oktober  
2019**

**10.00**

Dilantik jadi  
Menkominfo  
periode 2019-2024  
oleh Presiden  
Jokowi di Istana  
Merdeka

**12.00**

Bertemu Menteri  
Kominfo  
2014-2019,  
Chief RA, di Lt 7  
Gedung Utama  
Kominfo

**13.00**

Serah Terima  
Jabatan Menteri  
Kominfo periode  
2014-2019 di Lt  
8 Gedung B

**15.00**

Rapat  
Perkenalan  
dengan Eselon 1  
di Ruang Rapat  
Setjen

**KAMIS,**

**24  
Oktober  
2019**

**10.00**

Rapat Kabinet  
Paripurna di  
Istana Merdeka

**14.00**

*One on one  
meeting* dengan  
Sekjen, Dirjen  
SDPPI, Irjen, dan  
Dirjen PPI

**19.00**

Special Program  
Kabinet Indonesia  
Maju di Metro TV  
bersama  
Menteri PUPR

**JUMAT,**

**25**  
**Oktober**  
**2019**

**08.00**

*One-on-one meeting dengan Dirjen SDPPI*

**09.00**

*Tour building bertemu staf Kementerian Kominfo di Kantor Pusat Merdeka Barat No 9, Gedung Sapta Pesona dan Gedung Menara Merdeka*



**14.00**

*Menghadiri pelantikan Wakil Menteri periode 2019-2024 di Istana Merdeka*

**19.00**

*Menjadi Narsum acara Connected di CNN TV Indonesia*



**SABTU,**

**26**  
**Oktober**  
**2019**

**06.00**

*Menghadiri acara CNBC Indonesia Golf Tournament di Pondok Indah*

**19.00**

*Menjadi Narsum dalam Program Simfoni Kerukunan Bangsa di MetroTV bersama Wapres RI*

**SENIN,**

**28**  
**Oktober**  
**2019**

**09.00**

*One-on-one meeting dgn Dirjen Aptika*

**09.30**

*Rapim dengan Eselon 1 dan Eselon 2 di Lt 7 Gedung B Kominfo*

**13.00**

*Konferensi pers perdana "Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju"*

**08.00**

*Inspektur Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda di Kantor Kementerian Kominfo*





## MENKOMINFO JOHNNY G. PLATE FOKUS OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DIGITAL

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam masa jabatannya selama 5 tahun ke depan berencana memindahkan hal yang dia anggap sebagai titik *blankspot* dalam pengembangan-pengembangan yang sebelumnya dilakukan pemerintah terkait dengan platform digital.

Menurut Johnny, upaya tersebut akan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital yang telah dibangun pada masa jabatan Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Infrastruktur yang sudah kita bangun jangan sampai tidak bisa digunakan rakyat. Saya bukan berlatar belakang informatika, tapi saya berharap dapat mentransmisikan tindakan Presiden. Kementerian ini, bersama-sama kita melaksanakan kewajiban sesuai amanat UU,” ujar Johnny pada saat acara serah terima jabatan di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Selaku Menkominfo, Johnny juga akan fokus terhadap masalah perlindungan data pribadi dan pusat penyimpanan data nasional. Menurutnya, di sektor informatika dan digital, *borderless* sudah tidak dapat dihindarkan, sehingga ke depannya Kemenkominfo akan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk dapat terkoneksi dengan negara-negara lain.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto berharap sebagai Menkominfo Johnny dapat lebih mendahulukan kepentingan negara, terutama kedaulatan data, di tengah gempuran perusahaan *over the top* (OTT) dan kepentingan asing di sektor ICT di Indonesia.

“Pak Presiden Jokowi waktu memperkenalkan Menkominfo yang baru kembali menegaskan pentingnya kedaulatan data. Ini adalah sinyal yang baik, bahwa Presiden Jokowi sangat *concern* sekali dengan Kedaulatan data ini,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (23/10/2019).

Menurut Alex, Pemerintah harus secara serius meregulasi perusahaan OTT asing. Dengan demikian, lanjutnya, rampungnya proyek Palapa Ring tidak membuka jalan bagi perusahaan OTT asing untuk menguasai data dan pasar lokal tanpa memberikan kontribusi.

Selain itu, Pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi guna memberikan dukungan kepada anak bangsa agar mampu berkarya serta menciptakan layanan-layanan untuk meminimalisir ketergantungan kepada produk-produk OTT asing.

“OTT asing harus tunduk pada aturan di Indonesia. Jangan sampai negara kalah oleh OTT asing,” tegas Alex.

Kedua, tentang platform digital, perlu kita perhatikan bahwa hal-hal baik yang sudah kita kembangkan, ada titik-titik *blankspot* yang harus kita pindahkan. Ini harus kita lakukan.

Infrastruktur yang sudah kita bangun tapi tidak bisa digunakan rakyat. Saya bukan berlatar belakang informatika, tapi saya berharap utk mentransmisikan tindakan presiden, kementerian ini bersama2 kita melaksanakan kewajiban sesuai amanat UU.

### SUMBER

<https://teknologi.bisnis.com/read/20191023/101/1162564/menkominfo-johnny-g.-plate-fokus-optimalisasi-infrastruktur-digital>

Jakarta - Mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru, Johnny G Plate menuai harapan dari para pelaku industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk dari para pegiat startup.

“Siapa pun yang terpilih sebagai Menkominfo yang baru, tentunya telah melalui proses seleksi dan pertimbangan mendalam dari Presiden Jokowi,” komentar Bapak Startup Indonesia Yansen Kamto, dihubungi detikINET, Rabu (23/10/2019).

Dia meyakini, dengan pembangunan infrastruktur yang masif selama 5 tahun terakhir, maka makin besar peluang untuk menciptakan lebih banyak startup berkualitas di Indonesia.

“5 tahun ke depan adalah saatnya lebih banyak startup yang meroket serta menciptakan lebih banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya optimistis.

Founder dari Kinesys Group ini juga berharap dukungan penuh Menkominfo yang baru untuk kian memperkuat ekosistem startup di Tanah Air dan memberi dampak lebih besar bagi masyarakat.

“Tantangannya adalah bagaimana Menkominfo terpilih bisa terus mendorong ekosistem yang lebih kolaboratif di antara berbagai pihak, hingga akhirnya akselerasi ekosistem startup ini makin bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Terkait dunia startup, Johnny yang baru dilantik sebagai Menkominfo hari ini, Rabu (23/10), mencanangkan ambisi besar, yaitu mencetak startup *hectocorn* yang memiliki valuasi di atas USD 100 miliar atau di kisaran Rp 1.400 triliun.

“Indonesia harus mampu menghasilkan lebih banyak *t, decacorn*, dan kalau bisa kita punya startup dengan skala USD 100 miliar,” ucap Johnny usai serah terima jabatan di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (23/10).

Mengenai strategi dalam melahirkan startup *hectocorn* ini, politisi Partai NasDem ini menyebutkan pemerintah akan menempatkan diri dari regulator jadi fasilitator. Adapun konsep tersebut, sudah diusung oleh Rudiantara saat menjabat Menkominfo.

“Nanti kan banyak ahlinya, yang pasti dilakukan adalah kemudahan, peran regulator menjadi juga fasilitator seperti yang disampaikan untuk mempercepat kesempatan-kesempatan, khususnya di bidang digital sebagai tempat selancarnya para milenial, itu akan jadi perhatian besar,” tutupnya.

#### SUMBER

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4757758/menkominfo-johnny-ini-harapan-bapak-startup-indonesia>

Jakarta, CNN Indonesia -- Johnny G Plate akan memulai tugasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika baru. Dari asosiasi hingga operator seluler telah menyampaikan harapan dan pesan terhadap menkominfo baru.

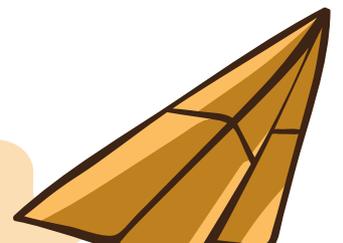
Dewan TIK Nasional Garuda Sugardo pun menyampaikan tiga pesan untuk Menkominfo Johnny G Plate.

Pertama, Garuda menyampaikan agar Menkominfo baru dapat membenahi Museum Telekomunikasi yang selama ini terbengkalai. Menurut Garuda, di era digital dengan penyimpanan jejak digital, barang asli sering disepelekan.

“Di era informasi ini, kita acapkali menyepelekan barang asli dan hanya menyimpan foto-fotonya di memori ponsel. Padahal barang fisik, foto album dan video tiga dimensi sesuai apa adanya amatlah berharga sebagai bukti atas terjadinya suatu peristiwa,” ujarnya, kepada CNNIndonesia, Rabu (24/10).

Garuda mengungkap Museum Telekomunikasi yang ada saat ini sudah bobol dan kumuh sehingga membutuhkan perhatian dari Menkominfo baru.

“Jangan salah, museum bukanlah sekedar tempat peragaan artefak. Museum adalah tempat di mana sebuah lintas peradaban, baik masa lalu, sekarang, dan masa depan tersimpan dan diabadikan guna melestarikan sebuah peradaban,” tambah Garuda.



“Jangan sampai Mustel dikelola oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi pertelekomunikasian. Lokasinya? Masuk gerbang TMII, tengok ke kanan. Jangan lupa, bila besuk ke sana bawa tisu dan masker secukupnya,” ujar Garuda.

Kedua, Garuda mengingatkan semerawutnya peletakan tiang dan kabel optik di penjuru kota. Dia menilai masalah penataan ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot atau Pemprov bersama operator.

“Kemenkominfo harus proaktif dalam gerakan pembenahan jaringan dan tiang internet agar tidak jorok lagi. Kita sudah bermimpi tentang Smart City, Pita Lebar Nusantara, Seluler 5G, Robotik, Dunia Siber dan Industri 4.0, masa kolaborasi ngurusin kabel semrawut selama Indonesia merdeka gak bisa?” ungkap Garuda.

Ketiga, dia menilai UU Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 sudah genap berusia 20 tahun. Aturan ini tidak hanya expired tetapi juga telah basi.

“Menkominfo harus sekuat upaya dan secepatnya memajukan konsep UU Telekomunikasi (atau apapun namanya nanti) ke dalam Forum Prolegnas DPR RI,” ujar Garuda.

Menurutnya, sudah dua dekade dan wajah pertelekomunikasian nasional telah berubah drastis. Perubahan teknologi cukup drastis sehingga regulasinya dibutuhkan yang menjangkau semua.

“Menkominfo adalah pejabat negara sekaligus salah satu garda terdepan program implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Ia harus memprioritaskan kelahiran UU Telekomunikasi yang baru.” pungkas Garuda

#### SUMBER

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024103924-213-442457/3-pesan-dewan-tik-untuk-menkominfo-johnny-g-plate>





Liputan6.com, Jakarta - Operator telekomunikasi memberikan ucapan selamat atas ditunjuknya Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru.

Johnny G. Plate menggantikan Rudiantara yang menjabat sebagai Menkominfo Kabinet Kerja Jokowi-JK pada periode 2014-2019.

Head of Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih mengharapkan agar Menkominfo Johnny G. Plate bisa terus mempertahankan dan meningkatkan terciptanya industri telekomunikasi yang semakin baik.

“Kami mengucapkan selamat kepada Menkominfo terpilih. Kami berharap Menkominfo yang baru dapat terus mempertahankan dan meningkatkan terciptakan industri telekomunikasi Indonesia yang semakin baik,” kata Tri Wahyuningsih dalam keterangan yang diterima Tekno Liputan6.com, Rabu (23/10/2019).

Ia berharap, dengan industri telekomunikasi yang makin baik, bisa mendorong dan mengakselerasi pemerataan pembangunan, khususnya dalam menyediakan akses layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia.

Senada, Telkomsel ikut memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Menkominfo Jonny G Plate.

Dalam keterangan Telkomsel, Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini mengatakan, Telkomsel akan selalu mendukung program kerja Menkominfo periode 2019-2024 dan siap berkolaborasi bersama dalam upaya memajukan industri telekomunikasi di Indonesia.

“Harapan kami, kepemimpinan Menkominfo periode 2019-2024 dapat mengakselerasi pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia,” tutur Emma.

Emma juga mengatajan, Telkomsel berharap agar Menkominfo mampu mendorong perilaku industri untuk membangun infrastruktur jaringan dan memperluas jangkauan layanan dan kualitasnya.

Telkomsel juga berharap, Menkominfo bisa menjaga tingkat harga yang sesuai kebutuhan dan tetap terjangkau bagi masyarakat, untuk mendukung iklim industri yang sehat dan berkepanjangan.

Dalam keterangan resmi, operator telekomunikasi Smartfren pun mengucapkan selamat bekerja kepada Menkominfo Johnny G Plate.

“Kami berharap Menkominfo yang baru akan mempercepat tersedianya akses telekomunikasi, khususnya di daerah-daerah yang masih belum terjangkau,” kata Presiden Direktur Merza Fachys dalam keterangannya.

Ia juga mengharapkan, sektor telekomunikasi mampu mendorong terbentuknya ekosistem industri digital yang diandalkan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Diharapkan lahir regulasi-regulasi yang dapat mendorong meningkatkan kesehatan penyedia infrastruktur telekomunikasi, sehingga menggairahkan iklim investasi pada penggelaran infrastruktur telekomunikasi ke seluruh pelosok tanah air,” kata Merza.

#### Indosat Ooredoo

Dalam kesempatan yang sama, manajemen Indosat Ooredoo juga mengucapkan selamat atas ditunjuknya Menkominfo Johnny G. Plate.

Operator yang lekat dengan warna biru ini berharap agar Menkominfo mampu menjalankan fungsi kementerian sebagai regulator untuk menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat di antara pelaku industri. Dengan demikian, pemerataan akses telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi digital bisa lebih cepat terlaksana.

Indosat juga menyoroti perlindungan konsumen dalam hal keamanan data pelanggan yang juga penting untuk diperhatikan Menkominfo.

“Kami juga berharap, Menkominfo terpilih akan melanjutkan program sebelumnya yang berdampak positif terhadap industri telekomunikasi Indonesia,” kata Indosat Ooredoo dalam keterangannya.

#### SUMBER

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4092983/ini-harapan-operator-seluler-kepada-menkominfo-johnny-g-plate>

## PRESIDEN RESMIKAN PROYEK PALAPA RING, TOL LANGIT SATUKAN INDONESIA LEWAT INTERNET

Proyek Palapa Ring yang seringkali disebut juga Tol Langit telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 lalu di Istana Negara Jakarta. Misi pemerintah menyatukan Indonesia lewat internet melalui Proyek Palapa Ring akhirnya tercapai.

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat luas. Indonesia bagian timur adalah wilayah yang paling sulit dijangkau terutama dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukurnya dengan beroperasinya Palapa Ring yang menjangkau 514 Kab/Kota se-Indonesia.

“Beberapa tahun lalu pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang tajam antar daerah dalam hal konektivitas. Oleh karenanya pemerintah berkomitmen menuntaskan infrastruktur ‘tol langit’. Tidak hanya memajukan sektor ekonomi, tapi juga budaya sosial politik kita,” ucap Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kata sambutannya dalam Peresmian Palapa Ring di Istana Negara, Senin (14/10/2019).

Presiden Jokowi juga mengakui beratnya pembangunan Palapa Ring di Indonesia Timur. “Memang yang paling berat itu Indonesia Timur, karena medannya berat sekali. Selain itu tidak semua infrastruktur di wilayah itu sudah menggunakan serat optik, sehingga menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Proyek jaringan tulang punggung (*backbone networks*) serat optik sepanjang 12.128 kilometer ini dibangun oleh pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo ini terbagi dalam tiga paket, yaitu Barat, Tengah dan Timur.

Paket Barat menghubungkan 5 kabupaten/kota layanan dan 7 kabupaten/kota interkoneksi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Paket Tengah menghubungkan 17 kabupaten/kota layanan dan 10 kabupaten/kota interkoneksi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.

Sementara Palapa Ring Paket Timur menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi yang meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

### Infrastruktur Tol Langit

Proyek Palapa Ring merupakan bagian dari Infrastruktur ‘Tol Langit’ yang menghubungkan 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan jaringan serat optik. Palapa Ring hadir sebagai wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat dan mengurangi kesenjangan digital khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang secara komersial tidak *feasible* untuk dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan dua skema, yaitu Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Skema Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan *backbone* serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU.



Sementara Palapa Ring dengan Skema KPBU dibangun oleh pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, menghubungkan jaringan sepanjang 12.128 kilometer di 57 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Skema KPBU dipilih karena Palapa Ring membutuhkan investasi dan kompleksitas teknologi yang cukup tinggi, yang tidak cukup dibiayai oleh APBN.

Palapa Ring juga merupakan proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan RI yang sumber dananya berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO) sebesar 1.25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU BAKTI).

### Pemerataan Layanan Telekomunikasi

Kehadiran Palapa Ring merupakan salah satu bentuk implementasi Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan, dalam bentuk upaya pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.

Palapa Ring secara bertahap akan pemeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia, dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Palapa Ring nantinya akan dilengkapi dengan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA yang dirancang untuk menjangkau 150 ribu titik di daerah pelosok yang tidak terjangkau kabel serat optik dari Palapa Ring. Bila semua telah diintegrasikan, akan tercipta tarif internet satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan masyarakat Indonesia secara adil dan merata (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.



## PENGENDALIAN IMEI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI AGAR PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PUNYA 'STNK'

Bayangkan jika mobil anda tidak mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), maka bisa dipastikan akan muncul rasa khawatir saat berkendara, mulai dari takut ditilang jika ada razia polisi sampai khawatir ada pemeriksaan STNK saat membawa kendaraan masuk pusat perbelanjaan. Sama seperti kendaraan, perangkat telekomunikasi juga harus memiliki 'STNK' yang biasa disebut nomor IMEI resmi yang terdaftar di database Kementerian Perindustrian.

IMEI atau International Mobile Equipment Identity adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor, dihasilkan dari 8 (delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

IMEI ini bersifat unik dan berbeda-beda dan selalu menempel pada perangkat telekomunikasi. Bagi operator telekomunikasi, IMEI biasanya digunakan untuk mengidentifikasi setiap ponsel yang mengakses jaringannya.

Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 18 Oktober 2019 telah mengeluarkan peraturan menteri masing-masing

ing kementerian terkait pengaturan IMEI. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi *illegal* yang masuk ke Indonesia.

Pengendalian perangkat telekomunikasi melalui IMEI dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Regulasi terkait pengendalian perangkat telekomunikasi HKT (*handphone*, komputer genggam dan tablet) dengan menggunakan IMEI ini mulai berlaku efektif pada 18 April 2020 mendatang.

Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungannya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan serta mengurangi tingkat kejahatan pencurian perangkat telekomunikasi HKT.

Regulasi pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi bukanlah hal baru di industri telekomunikasi, sudah banyak negara yang mengaplikasikan regulasi ini diantaranya Turki (2006), Mesir (2010),

Amerika Serikat (2012), Kenya (2012), Malaysia (2014), Pakistan (2018) dan lainnya. Dengan berbagai alasan mulai dari mencegah/mengurangi perdagangan ponsel curian, mencegah hilangnya potensi pajak, mengurangi kehilangan pendapatan akibat penjualan ponsel ilegal, juga untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat.

## Cek Status Imei

Untuk mengecek IMEI pada perangkat HKT terdaftar atau tidak, masyarakat bisa melihat deretan angka pada stiker yang tertera pada kardus boks kemasan perangkat HKT, atau dengan menekan tombol \*#06# pada handphone. Kemudian memasukkan nomor IMEI tersebut ke laman yang disediakan Kementerian Perindustrian yaitu <https://imei.kemenperin.go.id> untuk proses pengecekan. Jika terdaftar, di situs akan muncul tampilan “IMEI terdaftar di dalam database Kemenperin”, namun jika tidak terdaftar maka akan muncul di tampilan bahwa IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin.

Jika IMEI anda terdaftar saat melakukan pengecekan, maka perangkat tersebut dapat digunakan dengan normal. Jika tidak terdaftar dan telah aktif (menggunakan kartu SIM) sebelum tanggal 18 April 2020, maka perangkat tersebut tetap dapat digunakan dengan normal. Namun setelah tanggal 18 April 2020, bagi perangkat dengan “IMEI tidak terdaftar”, maka perangkat tersebut tidak mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi seluler.

## Mekanisme Pemblokiran Perangkat HKT via IMEI

Mekanisme pemblokiran perangkat HKT dilakukan dengan mencocokkan nomor IMEI perangkat yang terhubung ke jaringan dengan database ponsel resmi yang disimpan pemerintah. Jika nomor IMEI tersebut tidak ditemukan dalam database tersebut, maka perangkat tersebut akan diblokir dengan tidak mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi seluler.

Untuk perangkat HKT yang eksisting (sudah digunakan sebelum tanggal 18 April 2020), maka masyarakat masih tetap mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi seluler dari operator. Namun setelah tanggal 18 April 2020, untuk perangkat dengan IMEI yang tidak terdaftar,

maka perangkat HKT tidak mendapat layanan seluler.

Dalam pemberlakuan aturan ini terdapat beberapa pengecualian diantaranya bahwa peraturan ini tidak berdampak bagi turis/WNA (Warga Negara Asing) yang menggunakan layanan *international roaming*; dan aturan ini tidak berlaku untuk perangkat laptop.

## 3 Fase Pengendalian IMEI

Implementasi dari pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi ini berlangsung dalam tiga fase. Pertama, Fase inisiasi, ditandai dengan penandatanganan tiga Peraturan Menteri pada waktu yang bersamaan, yaitu Peraturan Menteri Kominfo, Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Perdagangan pada tanggal 18 Oktober 2019. Kedua, Fase Persiapan, dimana pada fase ini pemerintah menyiapkan Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA), sinkronisasi data di operator seluler dengan data di SIBINA, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyiapan pusat layanan konsumen.

Ketiga, disebut sebagai fase operasional yang akan dimulai sejak 18 April 2020. Pada fase ini Pemerintah dengan SIBINA-nya akan melakukan *updating* data IMEI secara rutin dan mengolahnya untuk selanjutnya hasil olahan tersebut dieksekusi oleh operator. Pemerintah juga akan menyediakan layanan *lost and stolen*, bagi Pengguna yang kehilangan perangkat HKT miliknya dapat melaporkan kehilangannya dan melakukan pemblokiran terhadap perangkat tersebut. Pada fase ini pemerintah juga akan melakukan sosialisasi lanjutan.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi kepada tiga kementerian. “Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Sementara, Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan *lost and stolen* bagi Pengguna dan melakukan pelaporan ke SIBINA, dan membangun sistem penghubung antara SIBINA dan EIR (*equipment identity register*). Sementara Kemendag akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA,” tuturnya

# SAIK 2019

## KOLABORASI KOMUNIKASI UNTUK PERKUAT PERSATUAN DAN KEDAULATAN BANGSA

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menggelar Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK). Tahun ini Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tuan rumah perhelatan nasional tahunan tersebut. Tema yang diangkat adalah “Kolaborasi Komunikasi Untuk Memperkuat Persatuan dan Kedaulatan Bangsa.”

SAIK 2019 melibatkan pejabat humas dari Kementerian/Lembaga, BUMN/D, Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Diskominfo Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, hingga Lembaga Komunikasi Sosial Media Pertunjukan Rakyat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Direktur Jenderal IKP, Prof. Widodo Muktiyo, menyampaikan bahwa humas di daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah di pusat dalam hal literasi media digital. “Tantangan kita bersama adalah bagaimana menghadapi luberan informasi yang banyak di antaranya adalah informasi negatif. Humas pemerintah wajib memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi seluruh humas pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kita harus bekerja bersama untuk membangun citra positif pembangunan negara baik di mata masyarakatnya maupun di mata dunia,” ujarnya.

Digelar selama tiga hari sejak 23 s.d. 25 Oktober 2019, Festival SAIK 2019 diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Forum Bakohumas Tingkat Nasional, serta Festival Pertunjukan Rakyat (Petunra) Tingkat Nasional, serta Pameran Public Expose & Public Service Exhibitions.

Tak hanya itu, peserta juga dibekali dengan Coaching Class Perumusan Strategi Komunikasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tentang strategi branding di era *new media*, pembuatan konten kreatif berupa meme, video pendek, dan infografis.

Melalui acara ini, para humas pemerintah diharapkan mendapatkan gambaran akan tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia terkait persatuan dan kedaulatan negara, dalam bentuk hoaks dan ujaran kebencian. Lebih daripada itu, diharapkan humas pemerintah dapat membangun narasi-narasi positif dan memunculkannya di tengah kegamangan publik, yang akan mendorong partisipasi publik untuk ikut menyuarakan isu persatuan dan kedaulatan negara.

Rangkaian kegiatan SAIK 2019 diawali dengan kegiatan *side event* berupa Jalan Sehat dan Senam Massal Bedincak yang diikuti oleh masyarakat lokal Bangka Belitung dan seluruh peserta SAIK 2019. Selain mengajak masyarakat lokal hidup sehat dengan berolahraga, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Senam Massal Bedincak, senam khas daerah setempat yang terinspirasi dari Tari Bedincak, tarian melayu khas Bangka Belitung.

Gelaran Exhibition & Market Place di Alun-Alun Taman Merdeka turut memeriahkan SAIK 2019. Berbagai instansi pemerintah ikut serta memamerkan produk-produk kehumasan unggulannya. Melalui pameran ini, masyarakat mendapatkan layanan informasi terkait program prioritas masing-masing instansi, tidak hanya melalui penjelasan dari penjaga pameran namun juga melalui kegiatan yang fun dan interaktif.

Di malam harinya, masyarakat disuguhkan dengan hiburan Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional. Masyarakat dapat menikmati penampilan dari seluruh peserta yang hadir mewakili setiap provinsi di Indonesia, menyuguhkan pertunjukan seni khas daerah masing-masing.

Malam Anugerah Media Humas 2019 menjadi penutup dari rangkaian kegiatan SAIK 2019 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bang-

ka Belitung. Tercatat ada 169 instansi yang mengirimkan karyanya untuk dilombakan dalam ajang apresiasi terhadap karya kehumasan bagi para insan humas pemerintah ini.

Ada perubahan dalam Klasifikasi Pemenang AMH tahun ini. Jika di tahun 2018 lalu klasifikasi pemenang tiap kategori dibagi berdasarkan Terbaik I, II, dan III tingkat Pusat dan Daerah, maka tahun ini Klasifikasi Pemenang tiap kategori dibagi sesuai instansi, yaitu Kementerian/Lembaga Terbaik, BUMN/D Terbaik, Perguruan Tinggi Negeri Terbaik, Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik.

Sementara untuk kategori Stan Pameran Instansi, terdapat penambahan klasifikasi pemenang yaitu Terinformatif dan Nusantara.

Adapun Daftar Pemenang AMH 2019 adalah sebagai berikut:



### Siaran Pers / Pemberitaan

- Kementerian/Lembaga Terbaik: Kementerian Keuangan
- BUMN/D Terbaik: PT Angkasa Pura I (Persero)
- Perguruan Tinggi Negeri Terbaik: Institut Pertanian Bogor
- Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik: Sekretariat Kota Tangerang



### Penerbitan Media Internal

- Kementerian/Lembaga Terbaik: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- BUMN/D Terbaik: PT Pertamina (Persero)
- Perguruan Tinggi Negeri Terbaik: Universitas Indonesia
- Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik: Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik: Sekretariat Daerah Kota Surabaya



### Media Sosial

- Kementerian/Lembaga Terbaik: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- BUMN/D Terbaik: PT Angkasa Pura I (Persero)
- Perguruan Tinggi Negeri Terbaik: Institut Pertanian Bogor
- Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik: Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik: Sekretariat Daerah Kota Surabaya



### Website

- Kementerian/Lembaga Terbaik: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- BUMN/D Terbaik: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- Perguruan Tinggi Negeri Terbaik: Universitas Padjadjaran
- Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik: Sekretariat Daerah Kota Surabaya



### Stan Pameran Instansi

- Dekorasi Terbaik: Kementerian Pariwisata
- Pelayanan Terbaik: Kementerian Perhubungan
- Terfavorit: Sekretariat Negara
- Terinovatif: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Terinformatif: Dewan Perwakilan Rakyat
- Nusantara: Humas Pemerintah Provinsi Papua Barat



### Juara Umum

- Sekretariat Daerah Kota Surabaya



# JANGAN BIARKAN FREKUENSI TERGANGGU



Hembusan angin senja menyeruak di pintu rumah yang terbuka. Di meja hadapan Alvin, aroma teh mengundang selera. Namun, pertanyaan demi pertanyaan dari Om Hamdan, mengurungkan tangan Alvin untuk mengambil gelas yang telah dihidangkan Dewi, tunangannya beberapa menit lalu.

Senja itu, Alvin dan Dewi berencana bertandang ke Pameran Buku Internasional di kawasan pusat kota. Pertanyaan dari Tante Voni sedikit menunda rencana pasangan yang baru bertunangan sebulan lalu itu.

“Assalamualaikum!” suara Pak RT dan Pak RW membuyarkan rencana yang melintas di benak Alvin. Kedatangan dua tokoh masyarakat itu akan membahas rencana pendirian radio untuk

komunitas bersama Om Hamdan, ayah Dewi. Konon, ide radio komunitas itu dicetuskan oleh Om Hamdan sebagai wahana pendidikan bagi masyarakat sekitar.

“Maaf mengganggu Pak Hamdan, kedatangan kami untuk membahas rencana pendirian radio komunitas yang dibahas dalam rapat RW malam ini,” ujar Pak RW.

Dalam diskusi awal itu, Pak RW menyebut radio akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan wilayah itu. “Karena ini bersifat swadaya, kami bermaksud meminta donasi dari setiap warga,” jelasnya.

\*\*\*





Sejurus kemudian, Alvin membuka suara. “Maaf, Pak. Perkenalkan nama saya Alvin. Kalau boleh tahu, apa Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak terkait? Karena pembuatan radio memerlukan izin tertentu,” tanya Alvin.

Ketua RW sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, apalagi dia belum mengenal Alvin. “Masnya ini dari mana ya?” tanya Ketua RW dengan sopan. Tersadar, Om Hamndan memperkenalkan Alvin kepada dua tamunya. “Dia ini calon menantu saya lho, Pak RW. Kebetulan dia satu kantor dengan anak saya, si Dewi, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Makanya dengar cerita bapak tadi, Alvin langsung ikut nimbrung,” jelas Tante Voni.

“Oalah... ini toh calon Nak Dewi. Oh iya, tadi gimana maksudnya, Mas? Bisa dijelaskan kah?” tanya Pak RW.

“Begini, Pak RW dan Pak RT. Penggunaan frekuensi radio itu harus memperoleh izin. Agar frekuensinya tidak tabrakan dengan pengguna lain,” tutur Alvin menjawab singkat.

“Tabrakan bagaimana, Mas? Saya kok jadi bingung. Kan tidak ada yang terlihat!” tanya Pak RT.

“Ya, meski tidak terlihat, tabrakan frekuensi itu bisa mengganggu. Misalnya, apakah pernah mendengar suara radio atau yang bercampur. Atau tumpang tindih? Tabrakannya seperti itu Pak,” jelasnya.

Pak RW dan Pak RT terdiam. Mencoba mencerna penjelasan Alvin. Om Hamdan pun menunjukkan wajah penuh tanya. Sebab, sebelumnya, ketika mendirikan radio ia tinggal mengotak-atik perangkat elektronik. Maklum, hobi membuat perangkat elektronik sudah dijalani sejak lulus SMK dulu.

Alvin segera menjelaskan kembali soal frekuensi radio. Ia menjelaskan seperti penjelasan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail. Mulai dari spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas hingga penggunaan untuk beragam kebutuhan dari sistem penerbangan, layanan seluler, siaran radio, *radio trunking* atau *handy talky*.

“Setiap perangkat itu akan bekerja pada frekuensi yang diperuntukkan. Kata Pak Ismail, frekuensi radio itu kan ibarat kue lapis. Setiap lapis tidak boleh bercampur antara lapis satu dengan lapis dua dan seterusnya. Kalau dalam satu lapisan itu ada dua pengguna, nanti informasi yang dikirim bisa terganggu. Itu bahaya lho, Pak,” ungkap Alvin sembari menatap ketiga pria paruh baya di hadapannya yang menyimak dengan serius.

\*\*\*

Penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. “Aturan itu bukan untuk membatasi masyarakat, karena pada dasarnya, spektrum frekuensi radio sama seperti sumber daya alam lainnya yang berhak digunakan oleh siapa saja,” ungkap Alvin.

“Walah... ada juga toh?” tanya Pak RW sedikit terkejut.

Sayangnya kebanyakan masyarakat belum memahami arti penting menggunakan



spektrum frekuensi radio dengan baik. Tak jarang, pandangan itu dapat meningkatkan ragam gangguan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna. “Jadi nanti sebelum dibuat, lebih baik bapak urus dulu izinnya. Daripada nanti ditertibkan,” tutur Alvin melanjutkan penjelasan sekaligus menyinggung rencana pembuatan radio komunitas.

“Oh itu yang dulu ada istilah *sweeping radio*,” cetus Om Hamdan sembari berkisah tentang pengalamannya bermain dengan radio bersama kawan-kawannya dulu.

“Betul Om,” cetus Alvin, seraya menjelaskan bahwa program itu tidak lagi dilakukan secara parsial. Namun akan berlangsung secara nasional dan serentak.

“Memang sudah berlangsung kah *sweeping*-nya, Nak Alvin,” tanya Pak RT.

“Ada, Pak. 28 Oktober sampe 1 November kemarin Kominfo baru saja menggelar Pekan Penertiban Frekuensi dan Alat Komunikasi Nasional 2019. Skalanya nasional, dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi Radio seluruh Indonesia,” lanjut Alvin.

Mengenai program Kominfo tersebut, Alvin menjelaskan bahwa tujuannya adalah menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan perangkat telekomunikasi,

sebagai upaya menurunkan terjadinya gangguan Spektrum Frekuensi Radio akibat pengguna yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis, serta dapat meningkatkan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Program itu dilaksanakan karena memang ada banyak pengguna spektrum frekuensi radio ilegal,” ungkap Alvin.

“Wah kalo begini kita harus rapat lagi dengan panitia pengurus,” ajak Pak RW kepada Pak RT “Ajak saja Mas-nya ini, biar penjelasannya enak. Kita kan sama-sama enggak paham,” balas Pak RT sembari mengarahkan pandangan ke Alvin. Ditodong seperti itu, Alvin merasa ragu. Menerima ajakan itu berarti menggagalkan rencananya bersama Dewi. Tapi karena merasa dia memiliki tanggungjawab moral terhadap hal itu, Alvin pun menerimanya. Di saat yang bersamaan, Dewi keluar dari kamarnya.

“Lho, Mas Alvin mau kemana?” tanya Dewi. Alvin tak tega sekaligus tak berani menjelaskan pada Dewi. Pandangannya mengiba agar Om Hamdan dan Pak RW bisa menjelaskannya. Awalnya Dewi sedikit kecewa, Tetapi ketika mendengar penjelasan Om Hamdan, akhirnya Dewi mengerti. Setelah mereka pergi, Tante Voni dan Dewi memandangi teh manis hangat yang tak sempat diminum Alvin. (hm.ys)

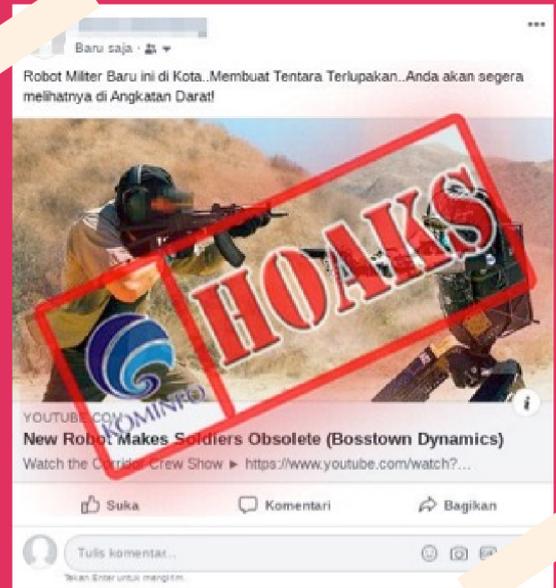


# 10 Hoaks Pilihan Miss Lambe Hoaks



## 1 Robot Militer Baru untuk Mengakhiri Prajurit di Angkatan Darat

Telah beredar sebuah video yang memperlihatkan Robot Militer baru membuat prajurit menjadi usang, mengklaim bahwa itu akan segera menjadi milik Angkatan Darat. Video ini menunjukkan robot bentuk manusia yang bergerak cepat dan menembak target dengan presisi sempurna. Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya dalam video tersebut bukanlah robot militer baru untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Ini sebenarnya adalah pembuatan CGI yang berasal dari efek Visual, studio produksi Corridor Digital yang berbasis di Los Angeles.



# HOAKSSSS

## 2 Pertolongan Pertama pada Orang yang Tenggelam dengan Cara Menggendong Terbalik Selama 20 Menit

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang yang menyelamatkan anak tenggelam dengan cara digendong terbalik dan diajak lari-larian. Video yang diunggah tersebut disertai dengan narasi, "Pertolongan pertama pada orang yang tenggelam dengan cara digendong terbalik dan berlari-lari selama 20 menit..." Faktanya, dilansir dari health.detik.com, ahli jantung dr.Vito A Damay,SpJP Rumah Sakit Siloam Hospital Karawaci, menjelaskan bahwa langkah pertama menangani korban tenggelam periksa dulu keadaannya. Apabila korban mengalami henti jantung maka segera lakukan resusitasi jantung paru (RJP), bukan dibawa terbalik begitu karena hanya membuang waktu yang berharga untuk si korban yang masih hidup.



### 3 Open Recruitment Lowongan PDTI dan PLD SATKER P3MD

Beredar sebuah informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan DPM Desa Jabar. Informasi yang beredar membuka lowongan sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Faktanya, informasi yang mengatasnamakan DPM Desa Jabar adalah tidak benar. Dilansir dari akun resmi media sosial Instagram @dpmdesajabar dan akun Facebook @official.jabarsaberhoaks memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar. Pengumuman resmi hanya dikeluarkan oleh media resmi DPM Desa Jabar baik Website, Instagram, Facebook ataupun Twitter.

### 4 Surat Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI



Beredar surat mengatasnamakan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, surat tersebut dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019. Adapun surat tersebut berisi tentang penerimaan Pa Perwira Karir tahun angkatan 2019. Dilansir dari akun Instagram resmi Puspen TNI @puspentni, surat tersebut tidak benar atau hoaks. Puspen TNI menghimbau untuk tidak mudah percaya dengan berita bohong seperti ini dan apabila ada yang menerima surat tersebut melalui Whatsapp atau pun Email abaikan saja karena pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

### 5 Jokowi Ingatkan Prabowo: Kalau Jadi Anak Buah Jangan Macam-macam



Sebuah akun Facebook mengunggah tangkapan layar artikel dari situs petroxi.blogspot.com. Artikel berjudul "Jokowi Ingatkan Prabowo: Kalau Jadi Anak Buah Jangan Macam-macam" tersebut sontak menuai reaksi negatif dari warganet.

Faktanya tidak ditemukan pemberitaan serupa dari media-media yang terverifikasi di Dewan Pers. Foto artikel tersebut mengambil foto milik jurnal suara.com, Arya Manggala, dari artikel berjudul Gerindra: Sejak Jadi Menhan, Prabowo Kini Bisa Berkunjung ke Amerika pada Kamis (24/10)". Saat ini artikel petroxi.blogspot.com tersebut sudah tidak bisa diakses lagi.

## 6 Panti Asuhan Rumah Kita Disegel Ormas

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyegelan Panti Asuhan Rumah Kita Bekasi yang dilakukan oleh ormas.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Candra Sukma Kumara yang menegaskan bahwa informasi tersebut hoaks. Hal yang sama juga dibantah oleh pengasuh Panti Asuhan Rumah Kita, Suhendra yang mengatakan bahwa tidak benar Panti Asuhan Rumah Kita telah didatangi oleh LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang melarang, menyegel, atau menolak keberadaan yayasan ini.



## 7

Pembuatan SIM Kolektif KOMPI Menwa Widyatama Bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Bandung

Telah beredar di media sosial sebuah poster mengenai adanya pembuatan SIM kolektif yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2019 di Universitas Widyatama Jl. Cikutra No. 204 A. Dalam poster itu dituliskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KOMPI Menwa Widyatama bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Bandung. Menanggapi informasi tersebut, TMC Polrestabes Bandung melalui akun Instagramnya @tmcpolrestabesbandung menegaskan bahwa pesan dalam poster tersebut adalah hoaks.





## Alipay Perusahaan China Disahkan Menggunakan Nama Dana

Telah beredar di platform Facebook tentang alipay anak perusahaan alibaba China disahkan menjadi alat bayar non tunai di Indonesia menggunakan nama dana.

Faktanya, setelah ditelusuri Communication Officer DANA Chrisma Albandjar menjelaskan, dompet digital DANA menggunakan bank domestik dalam melakukan transaksinya. Dengan begitu tidak ada aliran dana dari Indonesia ke luar maupun penguasaan dan pengendalian transaksi yang dilakukan oleh asing. Jadi kehadiran DANA tidak mengancam kedaulatan keuangan Republik Indonesia karena DANA bukanlah e-money asing, jelas dia, di Jakarta, Sabtu (8/12/2018). Dana adalah PT Elang Sejahtera merupakan usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). EMTEK memiliki kerjasama dengan Ant Financial, pemilik Alipay. Dengan kerja sama antara Emtek dan Ant Financial, DANA mendapatkan dukungan teknologi dari Ant Financial. Teknologi Alipay sudah diakui keamanan dan kehandalannya di dunia transaksi digital.



## Akun Instagram Menkes Terawan



Beredar akun Instagram yang mengatasnamakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Susanto. Sebelumnya akun Instagram tersebut bernama @terawanputranto yang langsung mendapat ribuan pengikut sesama pengguna Instagram. Selang beberapa waktu, akun tersebut berganti nama menjadi @terawanagusputranto. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut adalah palsu. Karokom Yanmas Kementerian Kesehatan drg. Widyawati menegaskan jika akun tersebut bukanlah milik Menkes Terawan. Dan hingga saat ini, Menkes Terawan belum memiliki akun Instagram.

# 10 Akun Twitter Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Me-like Konten Pornografi

Beredar di media sosial tangkapan layar (screenshot) akun Twitter Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid me-like konten pornografi. Dilansir dari news.detik.com hal tersebut tidak benar sesuai informasi dari Zainut yang menyatakan bahwa Twitternya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyisipkan konten pornografi. Saat ini akun Twitter @zainuttauhid sudah digembok. Dia menegaskan tidak pernah me-like konten porno di Twitter. Semua hal yang beredar atas nama saya adalah hoax," ujarnya.



**JANGAN SEBAR KONTEN HOAKS  
SUPAYA JAGAT MAYA TETAP DAMAI**



# FAKE NEWS



Rumors



Discredit



Lies



Incite



Distortion



Chaos



Confusion



Momen perdana Johnny G. Plate tampil di hadapan awak media dan rekan-rekan mitra kerja sebagai Menteri Kominfo periode 2019 - 2024, didampingi Menteri Kominfo periode 2014 - 2019, Rudiantara saat acara Serah Terima Jabatan di Ruang Anantakupa Lt.8 Kementerian Kominfo, Rabu (23/10/2019).







Menteri Kominfo periode 2019–2024, Johnny G. Plate, dan Menteri Kominfo periode 2014–2019, Rudiantara “dicegat” awak media untuk doorstop usai prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Ruang Anantakupa Lt.8 Kementerian Kominfo, Rabu (23/10/2019) IST

# SYUKURAN

# 5 TAHUN BERSAMA



Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Rosarita Niken Widyastuti, menyerahkan bingkisan berisi 3 Buku Cetakan Khusus kepada Chief Rudiantara dalam Syukuran 5 Tahun Bersama Chief RA, Selasa (22/10/2019). Ketiga buku ini memuat rekam jejak karya, kerja, dan gagasan Chief RA bagi kemajuan bangsa dan negara di sektor telekomunikasi.







Foto bersama seluruh civitas Kementerian Kominfo usai acara “Syukuran 5 Tahun Bersama Chief RA” di Lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Acara ini merupakan momentum memperingati Chief Rudiantara berkarya selama lima tahun sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.



Menteri Kominfo Rudiantara, CEO Indosat Ooredoo Ahmad Abdulaziz Al-Neama, serta jajaran mitra kerja operator telekomunikasi lainnya berfoto bersama dalam acara Silaturahmi dengan Mitra Kerja dan Pekerja Media sektor Komunikasi dan Informatika di rumah dinas Menkominfo, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (17/10/2019).







Menteri Rudiantara dikelilingi rekan-rekan jurnalis yang selama 5 tahun terakhir meliput kegiatannya sebagai Menteri Kominfo, mengikutinya hingga ke pelosok daerah. Menjelang akhir masa jabatan, Chief RA menggelar acara Silaturahmi dengan Mitra Kerja dan Pekerja Media sektor Komunikasi dan Informatika di rumah dinas Menkominfo, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

## EVENT REPORT #SISTERBERBICARA PEREMPUAN DAN HAK ATAS PRIVASI DI INTERNET

Hai #Sobatkom dan #Sisters!

Tahukah kalian bahwa isu tentang pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia, saat ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir? Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.

Nah, hal itulah yang menggagas Sisternet dan Kumpulan Emak Blogger untuk mengadakan Kelas #SisterBerbicara bertajuk “Perempuan dan Hak Atas Privasi di Internet”. Bertempat di Pojok Pintar Sisternet Ruang Press Room Kominfo, XL Axiata bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar event rutin bulanan tersebut pada hari Kamis 31 Oktober 2019 lalu.

Terlihat sekali antusiasme para #Sisters yang datang dalam kegiatan yang langsung selama 2 jam lebih itu. Apalagi saat ada mini game yang dimainkan secara berkelompok dari salah satu pembicara, Sister Monica Kumalasari. Selain itu, ada juga beberapa #Sisters yang mengajukan pertanyaan seputar topik yang disampaikan oleh masing-masing pembicara.

Wah, memang selalu seru, sih, setiap kelas yang diadakan oleh Sisternet. Siapapun yang datang, pulangny akan selalu membawa ilmu. Selain ilmu yang didapat, ada hadiah juga bagi #Sisters yang mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Selain menghadirkan Monica Kumalasari (Founder

MKS Learning), adapula Mira Sahid selaku Founder Kumpulan Emak Blogger (Pegiat Literasi Digital) yang juga turut menjadi pembicara dan menyampaikan paparannya seperti yang mimin tulis di bawah ini:

### Jaga Data Pribadi? Mulai Dari Diri!

Setiap hari, orang Indonesia tidak bisa dipisahkan dari gawai. Padahal dengan penggunaan gawai yang terhubung ke jaringan internet, akan memicu berbagai risiko. Secara otomatis, kebanyakan gawai dalam mode silent akan saling terhubung dan saling bertukar data.

Kondisi itu menurut Mira Sahid, pendiri Kumpulan Emak Blogger dan Pegiat Literasi Digital, sebagai hal yang tidak bisa dihindari. “Kita setiap hari bersentuhan dengan gawai, kan. Berapa akun media sosial yang kita punya? Siapa di sini yang punya lima akun?” tanya Mira dalam Bincang Sisternet bertema “Perempuan dan Hak atas Privasi di Internet” yang berlangsung di Press Room Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (31/10/2019).

Masih menurut Mira Sahid, kondisi itu sudah menjadi kebiasaan. Hampir semua masyarakat Indonesia, sudah tidak bisa dilepaskan dari internet dan media sosial. Ia menyebutnya sebagai socio materiality, kenyataan sosial yang harus diterima. “Manusia dan teknologi komunikasi sudah menyatu, setiap hari kita bersentuhan dengan gawai dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi interaksi sosial sudah tiak bisa dipisahkan lagi dengan teknologi komunikasi,” jelasnya.

### 3 Langkah Lindungi Data Pribadi

Meskipun demikian, Mira Sahid mengingatkan bahwa kebiasaan masyarakat terhadap internet dan media sosial pun masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya soal etika. Etika berinternet, lanjut Mira, akan mengarah ke aspek menjaga data pribadi.

Ada tiga hal yang ditekankan oleh Mira Sahid mengenai hal-hal yang perlu dipahami demi menjaga data pribadi maupun orang lain di internet. Pertama, pertimbangkan dengan benar ketika akan memberikan data pribadi diri sendiri, anggota keluarga ataupun milik orang lain baik secara online maupun offline kepada pihak manapun. "Tanyakan atau bacalah terlebih dahulu maksud serta tujuan permintaan data pribadi tersebut dan pertimbangkan risikonya. Bersikaplah kritis atas tawaran apapun," tegas Mira Sahid.

Hal kedua, menurut Mira Sahid, ketika menggunakan media sosial, batasi data pribadi yang diposting ke jaringan internet. "Data pribadi tersebut bisa berupa teks, foto ataupun video," tambahnya.

Terakhir, ketiga, pelajari dan pahami teknologi yang digunakan, baik itu gawai maupun layanan online seperti media sosial. "Aktifkan fitur perlindungan privasi sesuai dengan kebutuhan kita, jangan dibiarkan diset "default" karena bisa merugikan kita," tandasnya.

### Lindung Kepentingan Masyarakat

Apa yang disampaikan oleh Mira Sahid membuka diskusi mengenai isu perlindungan hak atas privasi di Indonesia. Bahasan itu kian menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir.

Tercatat, sejumlah kasus pernah menjadi perhatian publik akibat kebocoran data pribadi. Mulai dari data pribadi seseorang



yang berbuntut pada aksi penipuan hingga soal potensi penjualan data yang dilakukan karena pencurian data yang dikelola lembaga. Semua itu kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk kepentingan negara dan rakyat. "Itu tujuannya bukan untuk membatasi kita, jangan sampai itu ditanggapi secara sempit. Soal menyimpan data di dalam atau luar negeri, itu terkait dengan kepentingan negara dan rakyatnya," ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers "Kemkominfo di Kabinet Indonesia Maju" di Ruang Serbaguna, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menteri Johnny menyatakan pembahasan RUU PDP akan diteruskan prosesnya ke legislasi primer. Meskipun demikian, Menteri Kominfo tetap mengimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembentukan RUU PDP. "Jadi, jangan sampai nanti setelah UU-nya jadi, baru kita bersuara, baru nanti minta diulang, ya berhenti prosesnya," pungkasnya.

Memang, upaya pemerintah tak berarti tanpa partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tentu saja hal itu bisa dimulai dari diri. (hm.ys)

# LINTAS KOMINFO OKTOBER 2019

## Resmi Pimpin Kominfo, Johnny: Saya Akan Lanjutkan Program Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan, Kementerian Kominfo dalam lima tahun kedepan akan melanjutkan program pendahulunya, Rudiantara. “Hari ini saya secara resmi dilantik sebagai Menteri Kominfo RI. Kementerian di kabinet ini bukan kabinet awal, tapi periode lanjutan. Ini masa jabatan petahana,” kata Johnny saat serah terima jabatan Menkominfo di lingkungan Kementerian Kominfo Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurut Menteri Johnny, program-program dari Kementerian Kominfo harus ditindaklanjuti, dengan akselerasi dan penyesuaian. “Kontinuitas program yang sudah dibangun dalam rangka hal-hal yang baik yang harus ditindaklanjuti, tentu yang diminta adalah akselerasinya dan hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Mari kita koreksi untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsa kita,” jelasnya.



## Perdana Beri Arahan, Menkominfo Tekankan Dua Hal Penting

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebut Kementerian yang dipimpinnya memiliki dua fungsi vital. Pertama terkait komunikasi kebijakan negara, selanjutnya ihwal komunikasi publik.

“Komunikasi kebijakan negara, kebijakan pemerintah ini sangat dibutuhkan agar rakyat, bangsa kita mengetahui ke mana arah gerak pemerintah,” kata Menteri Johnny dalam rangkaian acara serah terima jabatan menteri Kominfo, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/10/2019) siang.

Peran kedua Kementerian Kominfo dalam melaksanakan komunikasi publik, erat kaitannya dengan peran pertama. Kata Menkominfo, masyarakat juga harus mengetahui capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. “Jangan sampai rakyat tidak tau capaian negara dan tidak bisa menggunakan atau memantapkannya,” jelasnya.

## #SelasaBahasa Ajak Anak Muda Gunakan Bahasa Indonesia di Media Sosial

Pemerintah mengajak generasi milenial Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media sosial melalui #SelasaBahasa. Kolaborasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dengan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pengembangan bahasa untuk generasi muda.

Melalui Program #SelasaBahasa Padanan Kata Kolibri, setiap hari Selasa akan dipublikasikan konten berbagai padanan kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang akan muncul di akun resmi Line @KEMKOMINFO dengan branding Kolibri (Kemkominfo Lintas Berita Terkini). “Ditjen IKP juga bekerja sama dengan LINE Indonesia untuk mendiseminasikan konten #SelasaBahasa Padanan Kata Kolibri di LINE Today,” jelas Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Ditjen IKP, Mediodecci Lustarini.



### Menkominfo Bicara Soal Target 4000 BTS hingga Decacorn

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. 4000 Base Transceiver Station (BTS) akan dibangun, khususnya untuk wilayah 'blankspot' di seluruh pelosok Indonesia. "Khusus untuk wilayah yang masih blankspot, infrastruktur akan kita teruskan, kita akan bangun 4000 BTS," ungkap Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (28/10/2019).

Menteri Johnny lantas mengutarakan bahwa pihaknya akan mencari jalan dan programnya untuk mempercepat proses pembangunan. Tujuannya, agar keterjangkauan, coverage teknologi informasi sampai ke rakyat, khususnya di wilayah 3T.

### Cegah Peningkatan Gangguan Frekuensi, Kominfo Gelar Pekan Penertiban Frekuensi dan Alat Komunikasi Nasional 2019

Kementerian Kominfo menggelar "Pekan Penertiban Frekuensi dan Alat Komunikasi Nasional 2019" pada tanggal 28 Oktober hingga 01 November 2019, yang juga diselenggarakan serentak di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi Radio seluruh Indonesia.

"Tujuannya agar masyarakat patuh dalam penggunaan frekuensi radio di Indonesia sehingga bersih dari gangguan yang bersumber

dari penyalahgunaan frekuensi radio atau penggunaan frekuensi radio secara tanpa izin (*illegal*)," ujar Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail saat menghadiri Kick Off kegiatan "Pekan Penertiban Frekuensi dan Alat Komunikasi Nasional 2019" di Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019).

### Kolaborasi untuk Kuatkan Konektivitas Digital Negara ASEAN

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menghadiri "The 19th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting and Related Meeting" (TELMIN) di Vientiane, Laos, Selasa (22/10/2019). Dalam pertemuan itu, Dirjen Samuel mendorong kolaborasi untuk penguatan konektivitas digital antarnegara anggota ASEAN.

Menurutnya seluruh negara di ASEAN perlu menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang kuat dengan berbagai mitra dan badan sektoral lain. "Saya percaya bahwa dalam 5 tahun terakhir, kita telah membuat kemajuan yang baik untuk mendorong ASEAN menuju ekonomi yang didukung secara digital. Tidak hanya mencapai penyelarasan hukum dan peraturan, tetapi juga menguntungkan bisnis dan konsumen di ASEAN," ujar Dirjen Samuel.

### Lindungi Masyarakat, Kominfo Akan Sempurnakan Aturan Registrasi Kartu Prabayar

Kementerian Kominfo tengah mempersiapkan penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Langkah itu dilakukan agar pemerintah optimal dalam mengendalikan peredaran data pribadi berupa NIK maupun nomor KK, guna melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

Menurut Plt. Direktur Pengendalian Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Sabirin Mochtar, salah satu alternatif yang dibahas adalah kemungkinan penghilangan opsi registrasi mandiri. "Artinya registrasi kartu perdana

hanya dapat dilakukan melalui gerai atau mitra, untuk menjamin saya adalah saya?” paparnya dalam Diskusi Publik “Bahaya Penipuan Online di Era Digital” di Auditorium Mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, Selasa (29/10/2019).

### Kominfo Susun Grand Design Tata Kelola Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyusun Grand Design Tata Kelola Komunikasi Publik tahun 2020-2024 yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden pada sesi *round table discussion* di Pangkal Pinang, Kamis (24/10/2019). Diskusi yang difasilitasi Ditjen IKP Kemenkominfo ini menghimpun masukan dari jajaran Diskominfo se-Indonesia.

Dalam *grand design* tersebut terdapat *roadmap* sebagai acuan secara periodik 5 tahunan. “Regulasi ini akan menjadi pedoman strategis yang terstandar secara nasional bagi jajaran Kominfo dipusat dan daerah dengan tujuan kemanfaatan persatuan kesatuan bangsa NKRI,” jelas Peneliti Utama Badan Litbang SDM, Gati Gayatri. Diskusi juga membahas rumusan visi dan misi komunikasi publik nasional agar mampu mendukung pencapaian visi nasional.

### Bicara Kedaulatan Data, Menkominfo Tegaskan RUU PDP untuk Kepentingan Publik

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan kedaulatan data di Indonesia saat ini tidak dimaksudkan dalam kaitan pembatasan yurisdiksi semata. “Itu tujuannya bukan untuk membatasi kita, jangan sampai itu ditanggapi secara sempit. Soal menyimpan data di dalam atau luar negeri, itu terkait dengan kepentingan negara dan rakyatnya,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers “Kemkominfo di Kabinet Indonesia Maju”, Senin (28/10/2019).

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, lanjut Menkominfo, pihaknya akan meneruskan proses pembahasan RUU PDP ke legislasi primer. Menteri Johnny menuturkan, antara perlindungan hak warga negara dengan manfaat bagi warga negara adalah dua titik yang saling tarik-menarik. Melalui sikap bijaksana dan kebajikan, kebijakan itu harus diatur dengan baik di dalam legislasi primer.

### 5 Tahun Pimpin Kominfo, Rudiantara Blokir Ratusan Ribu Situs Asusila

Kementerian Komunikasi dan Informatika dibawah kepemimpinan Rudiantara, sukses memblokir ratusan ribu konten-konten negatif. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai komitmennya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk internet. “Situs-situs yang melanggar UU ITE, terutama yang berkaitan dengan masalah kesusilaan atau asusila,” kata Rudiantara di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut, Rudiantara menyebutkan, situs atau konten asusila yang telah diblokir mencapai 900 ribu lebih situs. Sementara situs lainnya yang berkaitan dengan perjudian, peredaran obat-obat terlarang hingga radikalisme. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, jumlah pemblokiran terhadap konten-konten negatif tersebut mencapai 1 juta situs yang diretas selama lima tahun terakhir.

### Puji Kinerja ASN, Menkominfo: Banyak Capaian Luar Biasa!

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengapresiasi kerja keras Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kominfo. Selama 5 tahun memimpin, Rudiantara menilai para ASN sudah bekerja maksimal. Salah satu capaian terbesarnya, menurut Menteri Rudiantara, adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

“Semuanya berperan, yang disebut tadi semua itu bukan karya saya, itu karya teman-teman saya. Kebetulan saya jadi Menteri di sini jadi kebawa-bawa,” kata Rudiantara pada acara Syukuran 5 Tahun bersama Chief RA di Lapangan Anantakupa Kominfo, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Ia berharap acara ini menjadi semangat kegembiraan bagi seluruh ASN Kementerian Kominfo untuk bekerja lebih baik lagi.

TERIMA KASIH  
**CHIEF RA**

---

**MENTERI KOMINFO**  
KABINET KERJA  
(2014 -2019)

---

SELAMAT BEKERJA  
**JOHNNY**  
**G. PLATE**

---

**MENTERI KOMINFO**  
KABINET INDONESIA MAJU  
(2019 -2024)

---



# Komunikasi kebijakan

merupakan salah satu fungsi utama dari Kominfo yang harus berjalan seimbang. Jika rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, mereka bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul.

*Menkominfo*

*Johnny G. Plate*



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.9  
Jakarta Pusat, 10110  
(021) 3452841  
humas@mail.kominfo.go.id